MAKALAH DAN RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK B

Makalah Kelompok B

Kelompok B seminar nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) ini adalah kelompok yang secara khusus membahas subtema kedua seminar nasional, yaitu "Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas SDM Pendamping Pengembangan Masyarakat."

Jumlah makalah yang dipaparkan dalam kelompok B seminar nasional ini adalah sebanyak empat makalah. Penulis sekaligus pembicara dalam kelompok B ini adalah para pakar yang memiliki kompetensi terkait dengan subtema kelompok B. Judul makalah dan penulis sekaligus pembicara dari kelompok B seminar nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Pendamping Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan, yang ditulis dan disampaikan oleh Sumardjo (Kepala Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan LPPM IPB).
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas SDM Pendamping Pengembangan Masyarakat, yang ditulis dan disampaikan oleh Keppi Sukesi (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang).
3. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat, yang ditulis dan disampaikan oleh Djoko Susanto (Persatuan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia).
4. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas SDM Pendamping Pengembangan Masyarakat, yang ditulis dan disampaikan oleh I Gde Suyatna (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar).

PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Sumardjo[1]

ABSTRACT

Social capital and local indigenous are the key aspect in both sustainable community development and participatory development. Extension workers and community empowerment facilitators are one of the key actors of communication development in realizing quality and prosperity of society life. Extension/empowerment of society organization which involve in modern world progressively do not protect from requirement demand for extension competency as according to demand growth requirement of communication development or extension target. Therefore, there is a need a facilitator's qualification that have adequate standard in sustainable development. The well guaranteed of the competency will only be effective if it is supported through related professional association and the supervision by the institute of certification

Key words: *Social capital, local indigenous, community development, sustainable participatory development, community development facilitator*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Modal sosial merupakan unsur sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu bangsa. Dalam menyongsong era globalisasi dan era lepas landas, setiap bangsa memerlukan sumber daya manusia (SDM) dalam perspektif modal sosial yang memiliki keunggulan prima dan memiliki kualitas tinggi yaitu di samping menguasai iptek juga harus memiliki sikap mental dan *soft skill* sesuai dengan kompetensinya. Modal sosial yang besar harus dapat diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Tindakan yang cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan modal sosial, sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan bangsa yang produktif dan bermanfaat serta berkualitas untuk pendampingan dalam proses pengembangan masyarakat.

Dalam perspektif modal sosial, konsep "SDM" (human resources) merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem sosialnya dan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan. Manusia harus dilihat secara lebih utuh, sehingga konsep *"social capital"* (modal sosial) tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi kualitas modal modal sosial suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah kualitas modal sosial suatu bangsa akan menjerumuskan pada kemunduran suatu bangsa.

Proses pengembangan masyarakat berkelanjutan memerlukan tenaga pendamping yang berkualitas dan mampu memadukan konsep pengetahuan lokal (indigenous knowledge*)* dan modal sosial secara partisipatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping pengembangan masyarakat berkelanjutan perlu dilaksanakan secara spesifik lokasi dan mengedepankan aspek pengembangan energi sosial budaya alam.

---

[1] Kepala Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan LPPM IPB

Permasalahan

Peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan penting yang mengemuka berkaitan dengan aspek pengembangan masyarakat berkelanjutan adalah: 1) Bagaimana konsep peningkatan kapasitas modal sosial dalam pengembangan masyarakat?; 2) Bagaimana konsep peningkatan kualitas pendamping pengembangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kualitas pendamping/fasilitator pemberdayaan masyarakat?; dan 3) Nilai utama apakah yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan konsep partisipasi dan pengembangan energi sosial budaya kreatif?

Tujuan

Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis aspek penting yang terkait dengan peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan khususnya adalah: 1) Menganalisis konsep peningkatan kapasitas modal sosial dalam pengembangan masyarakat; 2) Menganalisis konsep peningkatan kualitas pendamping pengembangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kualitas pendamping/fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan 3) Mengkaji nilai-nilai utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan konsep partisipasi dan pengembangan energi sosial budaya kreatif.

PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Modal Sosial dalam Pengembangan Masyarakat

Modal sosial adalah hubungan yang sifatnya *mutual*, kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang berperanan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politik dan sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya interaksi sosial antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang sangat menentukan dalam penguatan modal sosial adalah intensitas interaksi antara warga masyarakat atau dengan pihak terkait, yang dapat berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif.

Modal sosial adalah kekuatan yang menggerakkan masyarakat, terbentuk melalui berbagai interaksi sosial dan institusi sosial. Menurut salah satu penggagas modal sosial, Robert Putnam, modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling percaya yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama (Putnam 1995). Seperti halnya modal yang lain, modal sosial dapat meningkat dan dapat pula menurun bahkan menghilang. Selanjutnya dikatakan bahwa hasil penelitian Putnam di Italia menggambarkan adanya korelasi positif antara modal sosial dan kinerja pemerintah daerah. Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial mempunyai peranan penting dalam penciptaan

pemerintah daerah yang responsif dan efisien, yang ditandai dengan adanya masyarakat yang kuat dan dinamis. Selain itu arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi mensyaratkan partisipasi lokal dalam pembangunan daerah dan modal sosial merupakan kekuatan tidak terlihat yang dapat mendorong keberhasilan partisipasi lokal tersebut. Dengan demikian penting sekali bagi pemerintah daerah memahami ide modal sosial terlebih dalam implementasi kebijakan-kebijakan di daerah dalam kerangka desentralisasi.

Konsep modal sosial berasal dari James Coleman dalam tulisannya yang berjudul '*Social Capital in the Creation of Human Capital*' yang diterbitkan oleh *American Journal of Sociology* tahun 1988. Modal sosial diartikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Konsep ini kemudian dielaborasi terkait dengan isu-isu pembangunan ekonomi masyarakat yang partisipatif, maupun politik. Dikatakan modal sosial apabila mengandung tiga komponen inti, yaitu: 1) kemampuan merajut kelembagaan (crafting institution); 2) adanya partisipasi yang setara dan adil, dan 3) adanya sikap saling percaya.

Agar pengembangan masyarakat berkelanjutan maka model pembangunan yang partisipatif seyogyanya menekankan konsep pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan modal sosial (social capital). Pada saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu kasus program yang menampilakn proses pengembangan keswadayaan masyarakat dengan membangun ketiga komponen modal sosial, maupun penggalian pengetahuan lokal tersebut atas inisiatif masyarakat, yang diserta penanaman nilai baru pembangunan ke dalam kebudayaan masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Manusia dalam Modal Sosial

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat lebih akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan kewenangan untuk itu, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuan jangka pendek pemberdayaan sebaiknya jelas (specific), terukur (measurable) dan sederhana (relistic), sehingga merupakan kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk mewujudkannya (achievable) dalam waktu tertentu. Tujuan pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya ditetapkan sebagai tujuan dalam jangka panjang (vision). Visi yang jelas berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan setiap proses pemberdayaan menuju pada suatu kondisi kehidupan di masa yang mendatang yang lebih jelas.

Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (real-needs) masyarakat dan bukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (felt-need). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdayaan semestinya mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian

rupa dengan masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kontek penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini cukup banyak dikembangkan, kebutuhan yang diangkat sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogyanya merupakan konsensus antara pihak-pihak yang mendefinisikan kebutuhan, misalnya pemerintah, perusahaan, masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemberdaya atau pemberi pelayanan serta akademisi/peneliti. Peran pemberdaya mengupayakan dialog antara para pendefinisi kebutuhan sehingga diperoleh konsensus mengenai kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Diutamakan, pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat sendiri, dengan cara mengajak orang untuk berdialog dan mengembangkan kemampuan warga untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo 2009).

Pasang-surut dalam Pengembangan Kapasitas Manusia Pembangunan

Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan adalah menghargai nilai lokal (valuing the local). Prinsip-prinsip ini tersirat oleh gagasan pembangunan yang bersifat "*bottom up*". Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat. Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo 2007).

Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan pertanian yang sentralistik tampak prioritas dalam penyuluhan adalah (Sumardjo 2009) *Better farming, better business, better living;* Masa Transisi Agribisnis-Reformasi adalah *Better business, better farming, better living;* dan Masa Reformasi adalah *Better living, better business, better farming.*

Pada masa pembangunan yang sentralistik teknik produksi dikembangkan secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, penelitian dan pelayanan untuk mencapai target-target produksi. Dengan teknik produksi yang baik maka akan terjadi bisnis usahatani yang baik yang selanjutnya diharapkan meningkatkan kualitas hidup. Dalam penyuluhan saat itu dikenal istilah dipaksa-terpaksa-terbiasa, sehingga menjadi apatis. Faktanya, kesejahteraan petani kurang terwujud, bisnis pun kurang berkembang meskipun petani sudah menggunakan teknologi pertanian inovatif.

Konsep agribisnis demikian gencar digerakkan pada awal reformasi dengan prinsip *better business, better farming dan better living*. Utamanya adalah pengembangan kemampuan bisnis, karena dengan kemampuan bisnis yang baik maka petani akan memilih menerapkan teknologi pertanian yang terbaik. Faktanya, sistem agribisnis yang asimetris menyebabkan kemampuan bisnis tetap lemah, karena tersekat-sekat oleh terputusnya informasi hulu-hilir dalam sistem agribisnis. Hasilnya, kesejahteraan petani juga kurang terwujud, karena tidak efektif terjadi perubahan perilaku bisnis, posisi tawar petani tetap rendah.

Dewasa ini, pada akhir dekade reformasi hipotesis muncul yang perlu diutamakan adalah *better living*, dengan kualitas hidup yang baik maka perilaku konsumtif terkendali dan perilaku produktif berkembang, tingkat pendidikan dan

pengelolaan keuangan keluarga menjadi kondusif, maka keputusan-keputusan bisnis usahatani menjadi terdukung. Pada kondisi seperti itu, inovasi teknologi lebih dapat dicerna karena daya nalar yang semakin baik. Pada musim-musim panen raya petani tidak harus buru-buru menjual hasil produksinya dengan harga murah, tetapi melakukan pengolahan hasil untuk mendapatkan nilai tambah. Hasil usahatani ditabung dan diinvestasikan pada usaha produktif, sehingga penghasilan meningkat dan pada gilirannya tersedia dana untuk akses informasi dan akses inovasi di dalam berusahatani.

PENINGKATAN KUALITAS PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat

Agar lembaga penyuluhan atau komunikasi pembangunan berhasil, setidaknya ada empat kondisi yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan dalam organisasi penyuluhan tersebut, yaitu: 1) Kejelasan misi; 2) Kejelasan Standar kompetensi profesi penyuluh/fasilitator pemberdaya/pendamping; 3) Aktualisasi informasi/inovasi; dan 4) Penghayatan atas budaya organisasi penyuluhan/ pemberdaya masyarakat. Kejelasan misi yang dihayati bersama seluruh personil merupakan prasyarat bagi keberhasilan organisasi profesi pemberdaya masyarakat. Mengingat penyuluh/fasilitator pemberdaya adalah penentu keberhasilan organisasi penyuluhan, maka pengembangan aspek kompetensi penyuluh perlu menjadi perhatian organisasi penyuluhan/pemberdaya masyarakat dalam mengemban misi dan tugas-tugasnya, agar aktivitas dan program dapat lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi warga masyarakat terkait yang sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan lingkungan. Penyuluh/fasilitator pemberdaya memiliki kebebasan atau otonomi untuk menentukan seberapa baik untuk mencapai visi dan mengemban misi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat, sehingga penyuluh perlu diberi kesempatan untuk akses informasi dan inovasi seluas-luasnya, sehingga dapat berkreasi secara kompeten. Di India, *Cyber Extension* merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk itu.

Mengingat penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai pelaku utama dalam komunikasi pembangunan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, maka budaya organisasi yang jelas perlu dikembangkan, misalnya menjunjung nilai (value) berkomunikasi secara asertif, dialogis dan konvergen; mengemban tugasnya secara seimbang, adil dan beradab; berpikir/berorientasi global dalam mengelola sumber daya lokal; hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan sebagainya.

Organisasi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang berkiprah di dunia yang semakin modern tidak terhindar dari dituntutan kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan/komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar kompetensi bagi seorang penyuluh, agar kinerja penyuluhan dapat diprediksikan arah, dijamin kompetensi dan kinerjanya.

Kompeten diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan (standar). Kebutuhan kompetensi bagi penyuluh/pemberdaya setidaknya disusun berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kebutuhan pembangunan masyarakat, dan 2)

kebutuhan kompetensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat.

Standar Kompetensi Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat

Apa yang dimaksud standar kompetensi, standarisasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi ? Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan. Dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu: 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan terampil (baik); 2) mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar (cermat); 3) memahami apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula; dan 4) memahami bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Standardisasi kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan dan memberlakukan, menerapkan dan meninjau kembali standar kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang dan jenjang profesi tertentu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi. Mengapa standarisasi kompetensi dibutuhkan ?

Manfaat kejelasan standar kompetensi ini adalah untuk institusi pendidikan dan pelatihan adalah: 1) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, dan sertifikasi. Kemudian, bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja hal ini bermanfaat untuk: 1) Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja; 2) Membantu penilaian unjuk kerja; 3) Dipakai untuk membuat uraian jabatan; dan 4) Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri/pertanian. Di lain pihak standar kompetensi bermanfaat Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, yaitu: 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya; dan 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

Kapan seorang penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai komunikator pembangunan dapat dikatagorikan sebagai penyuluh yang kompeten? Sesorang dikatakan sebagai Penyuluh yang kompeten apabila seseorang yang mampu (Sumardjo 2006): 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyuluhan dengan terampil untuk memberdayakan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya; 2) mengorganisasikan sistem penyuluhan sehingga efektif memfasilitasi masyarakat dengan cermat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri; 3) melakukan tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semula; 4) bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (local specific); dan 5) mampu mensinergikan kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat Pelaku Utama Komunikasi Pembangunan

Pengukuran kompetensi penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat dapat dilihat dari dimensi-dimensi perilaku (behavior), seperti kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif. Hasil dari implementasi kompetensi penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat tersebut merupakan kinerja (performance) penyuluh. Pengukuran kompetensi bisa ditempuh dengan empat pendekatan, yaitu: 1) mengamati langsung (observasi) perilaku penyuluh; 2) wawancara terhadap menyuluh atas apa yang telah dilakukannya; 3) mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang mengetahui dengan baik sepak-terjang penyuluh/fasilitator pemberdaya dalam bertugas; dan 4) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluh pada yang bersangkutan, misalnya atasan, kolega/teman sejawat, petani (pelaku utama), dan pengusaha (pelaku usaha). Sedang pengukuran kinerja, dapat dilakukan melalui pengamatan hasil kerja penyuluh/fasilitator pemberdaya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penyuluh atau pendamping atau fasilitator pemberdaya masyarakat pada dasarnya adalah salah satu pelaku utama komunikasi pembangunan. Beberapa penelitian disertasi di beberapa tempat menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh pada dekade awal abad 21 terkait dengan tuntutan pembangunan saat itu, dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian (disertasi) Jelamu Ardu Marius (2007) di Nusa Tenggara Timur, Bambang Gatut (2008) di Jawa Barat, serta hasil penelitian behavioral penyuluh lainnya yaitu Herman Subagio (2008) tentang kapasitas petani di Jawa Timur (*dalam* Sumardjo 2008).

Rendahnya kompetensi penyuluh sebagai pelaku utama komunikasi pembangunan ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah terjadi melemahnya komitmen pemerintah terhadap penyuluhan. Pada beberapa Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen dukungan terhadap eksistensi dan pengembangan penyuluhan, sehingga kurang menstimulan terjadinya upaya pengembangan kompetensi para penyuluh.
2. Kurang dukungan keberlanjutan pengembangan inovasi dari lembaga pelatihan bagi penyuluh yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan keinovatifan materi yang dibawakan oleh fasilitator dalam lembaga pelatihan bersangkutan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan usahatani petani.
3. Kurangnya dukungan inovasi berkelanjutan bagi penyuluh yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan usahatani dan pemenuhan kebutuhan petani setempat pada saat itu.
4. Perubahan paradigma pembangunan dari *top down* ke partisipatif, yang kurang disertai upaya pemberdayaan penyuluh secara memadai ke arah yang sejalan dengan perubahan paradigma tersebut.
5. Terdapat upaya peningkatan pendidikan formal pada penyuluh namun diduga kuat banyak di antaranya ditempuh melalui proses pembelajaran yang kurang bermutu terkait dengan peningkatan kualitas penyuluhan, karena terjebak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian ijazah dengan tingkatan jabatan fungsional penyuluh.

6. Kurang jelasnya hubungan antara kompetensi penyuluh dengan perkembangan jenjang karir dan insentif bagi perkembangan kompetensi penyuluh.
7. Belum adanya standar kompetensi bagi penyuluh, sehingga menjadi lemah dalam pengembangan kompetensi secara sistematis oleh pihak terkait, maupun dalam rekruitmen tenaga penyuluhan.

NILAI UTAMA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nilai Utama dalam Pembangunan

Tiga nilai utama (three core value of development*)*, versi Adaro dan Smith (2009) yang perlu dikembangkan dalam pembangunan, yaitu: *sustenance*, *self-esteem dan freedom*. *Sustenance* ditandai dengan kemampuan mendapatkan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan rasa aman (Ghosh 1984). *Self-esteem* ditandai dengan berlakunya pengakuan sebagai manusia seutuhnya (to be a person) yang merupakan komponen universal kedua terpenting dalam kehidupan yang layak. *Fredom from servitude* adalah adanya iklim kebebasan manusia untuk memilih, yang dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi alienasi dalam kehidupan, tekanan institusi, dogmasi dalam keyakinan, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya pengentasan diri dari kungkungan kemiskinan.

Millenium Development Goals sebagai Sasaran Pembangunan

Pandangan umum tentang pembangunan berkelanjutan mencakup antara lain realitas fisik (ekologis) dan realitas sosial yang mencakup kombinasi atas aspek sosial, ekonomi dan proses-proses kelembagaan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang semakin meningkat. Apapun komponen yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dalam tataran pembangunan di seluruh masyarakat setidaknya mencakup tiga tujuan berikut (Adaro & Smith 2009):

1. *To increase the avalailability and widen the distribution of basic life-sustaining goods such as food, shelter, helt and protection.*
2. *To raise levels of living*. Tercakup di dalamnya adalah peningkatan pendapatan, kesempatan kerja/peluang usaha, peningkatan pendidikan, perhatian yang lebih baik terhadap nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Jadi tidak hanya yang bersifat material/fisik, tetapi terutama yang sifatnya peningkatan kualitas kemanusiaan dan kebangsaan (self-esteem).
3. *To expand the range of economic and social choices*, yang secara individual dan kebangsaan lebih memungkinkan mendapatkan keleluasaan meraih akses pelayanan tidak hanya dalam berinteraksi dengan sesamanya dan sebangsanya, tetapi juga keleluasaan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam arti yang lebih luas.

Pada September 2000, sebanyak 198 negara anggota PBB telah mengadopsi delapan *Millenium Development Goals (MDGs*) sebagai wujud nyata komitmen dalam pertumbuhan untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam pembangunan manusia pada tahun 2015. MDGs berupaya memperbaiki dengan fokus pada pengembangan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah kelaparan (UNDP 2003). Delapan indikator pembangunan di era milenium meliputi :

1. *Eradicate extreem poverty and hunger*

2. *Achieve universal primary education*
3. *Promote gender equality and empower women*
4. *Reduce Child mortality*
5. *Improve maternal health*
6. *Combat HIV/AID, malaria and other diseases*
7. *Ensure environmental sustainability*
8. *Develop a global partnership for development*

Agar tujuan pembangunan di era milenium benar-benar dapat menyentuh permasalahan yang lebih luas di tingkat masyarakat, maka solusinya adalah pengembangan masyarakat secara partisipatif. Terkait dengan pengembangan masyarakat secara partisipatif dalam implementasi kekinian, konsep modal sosial menjadi sebuah konsep yang diterima secara umum oleh ilmuan sosial dari berbagai disiplin ilmu. Konsep ini kemudian berkembang dengan pesatnya dan menjadi perhatian banyak pihak. Modal sosial bahkan dengan dahsyatnya dianggap sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Selain diterima oleh berbagai kalangan, modal sosial juga menjadi bahan perdebatan antara ilmuan sosiologi, antropologi, politik dan juga ekonomi (Widodo 2008).

Selanjutnya dalam debat tersebut Slamet Widodo menemukan bahwa modal sosial memiliki keunikan yaitu *relational*. Modal ekonomi terdapat pada rekening bank seseorang, modal manusia terdapat pada otaknya dan modal sosial berada pada struktur hubungan antar individu. Untuk mendapatkan modal sosial, seseorang harus berhubungan dengan orang lain dimana diantaranya saling mendapatkan manfaat (Portes *dalam* Narayan 1999; Dasgupta 1997).

Sebagai sebuah bagian dari struktur sosial dimana individu berada, modal sosial bukan merupakan hak milik salah satu individu pun dalam struktur sosial, walaupun tiap-tiap individu mendapatkan kesempatan menikmati keuntungan atas kapital sosial yang ada (Coleman *dalam* Narayan 1999). Modal sosial hanya akan bermanfaat apabila didistribusikan antar individu dalam suatu struktur sosial. Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mempunyai sifat "barang milik umum". Terdapat beragam pendekatan untuk memahami modal sosial. Sebagai contoh, Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai bentuk tanggungjawab dan harapan; norma sosial dan saluran informasi. Selain itu modal sosial juga dapat ditelaah menggunakan dimensi kognitif dan struktural. Modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat kompleks dan sering kali berupa fenomena abstrak seperti kepercayaan, nilai, norma kerjasama, jaringan formal maupun informal, lembaga yang efektif dan stabil serta kohesi sosial (Widodo 2008).

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan masyarakat hanya efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan beradab, manakala masyarakat secara nyata telah berpartisipasi. Masyarakat akan berpartisipasi apabila mereka berdaya untuk melaksanakannya. Masyarakat hanya akan berdaya dalam berpartisipasi apabila didukung oleh manusia-manusia atau individu masyarakat yang mandiri (autonomous). Penyuluhan merupakan pilar utama dalam mengembangkan

kemandirian individu masyarakat tersebut secara partisipatif, adil dan bermartabat (Sumardjo 1999; 2000).

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig & Mayo 1995; Hikmat 2004). Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menyebabkannya dapat lebih mampu secara proporsional memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Semakin tinggi wawasan, keterampilan seseorang semakin termotivasi untuk semakin berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dengan intervensi pihak luar yang minimal, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi pilihan strategis, keputusan atau tindakan, memobilisasi sumber-sumber, maupun menggerakkan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat, karena tidak terjadi proses pembelajaran diri atau proses pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri.

Di era otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia, sudah saatnya penyuluhan di Indonesia kembali pada filosofi penyuluhan yang sebenarnya, yaitu mengembangkan partisipasi rakyat dalam pembangunan atas dasar manfaat yang akan diperoleh dan bukan atas dasar sekedar kerelaan berkorban. Prinsip pembangunan yang partisipatif menempatkan rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Inisiatif dan kreatifitas rakyat ditempatkan sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama.

Partisipasi mengandung konotasi yang berbeda-beda untuk berbagai orang, sebagaimana terumus dalam pokok-pokok berikut (Ban & Hawkins 1996):

1. Sikap kerjasama petani dalam aktivitas perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Pengorganisasian kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh kelompok masyarakat (petani) dan memberi masukan kepada penyuluh, peneliti dan pihak-pihak terkait
3. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan program penyuluhan yang efektif.
4. Aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dalam organisasi jasa penyuluhan, mengenai tujuan, substansi dan metode, serta dalam evaluasi kegiatan.
5. Membiayai sebagian atau seluruh kegiatan yang dibutuhkan jasa penyuluhan.
6. Supervisi agen penyuluhan oleh anggota dewan pelaku utama (subyek pembangunan/ petani) yang mempekerjakannya.

Menurut Ban dan Hawkins dalam penyuluhan oleh PNS lebih memusatkan makna ke empat, yaitu partisipasi pelaku utama dalam pengambilan keputusan, tetapi tetap memperhatikan tafsiran kedua dan ketiga. Partisipasi menurut tafsiran keempat dan kelima terkait dengan keterlibatan penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.

Ada beberapa alasan mengapa petani mesti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program penyuluhan (Ban & Hawkins 1996):

1. Mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan, maupun struktur sosial masyarakat mereka.
2. Mereka akan termotivasi untuk bekerjasama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggungjawab di dalamnya.
3. Masyarakat yang demokratis pada umumnya menerima bahwa rakyat berhak telibat dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan/ manfaat yang ingin mereka raih.
4. Banyak masalah-masalah pembangunan yang bersifat kompleks dan tidak mungkin lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan secara perorangan, misalnya pengendalian erosi/banjir, keberlanjutan sistem usahatani, pengelolaan kegiatan komersial dalam usaha pertanian dan sebagainya.

Partisipasi memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir manusia. Perubahan-perubahan melalui proses partisipasi lebih memberikan makna dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan rakyat (masyarakat) sebagai subyek pembangunan atau subyek pengembangan masyarakat. Partisipasi di dalam perencanaan, penerapan/pelaksanaan, dan pengevaluasian program, serta pemanfaatan hasil program pembangunan memang diperlukan, karena akan meningkatkan motivasinya untuk bekerjasama dan menambah kesempatan untuk pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi itu juga meningkatkan kekuatan masyarakat memperbaiki nasibnya sendiri. Partisipasi semacam itu tidak akan dapat dicapai dengan gaya kepemimpinan otoriter atau pendekatan pembangunan *top down*.

Prinsip-prinsip yang penting dalam pembangunan masyarakat antara lain: 1) keterpaduan pembangunan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pribadi/ spiritual; 2) mengatasi ketidakberdayaan struktural; 3) menjunjung hak asasi manusia; 4) keberlanjutan; 5) pemberdayaan; 6) kaitan masalah individual dan politik; 7) kepemilikan oleh komunitas; 8) kemandirian; 9) ketidaktergantungan pada pihak lain termasuk pemerintah; 10) keterkaitan jangka pendek dan menengah; 11) pembangunan yang bersifat organik dan bukan mekanistik; 12) kecepatan pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat; 13) pengalaman pihak luar diadaptasi sesuai kondisi lokal; 14) proses sama pentingnya dengan hasil pembangunan; dan 15) prinsip lainnya seperti proses tanpa paksaan, partisipatif, inklusif, koperatif, serta pengambilan keputusan secara demokratis, dialogis dan berdasarkan konsensus.

Pentingnya Mengembangkan Energi Sosial Budaya Kreatif

Kegiatan memberdayakan masyarakat berlangsung baik apabila ditempuh dengan mengembangkan potensi energi sosial kreatif ini. Pendekatan yang ditempuh dengan membuka wawasan para tokoh dan masyarakat pada umumnya melalui komunikasi dan penyebaran informasi tentang ide pemecahan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Energi sosial budaya kreatif meliputi tiga komponen utama, yaitu: *ideals, ideas,* dan *friendship* (Sumardjo 1992).

Terbukanya wawasan melalui proses komunikasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan *ideals* suatu kondisi yang diidealkan dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkannya. *Ideals* ini dapat menumbuhkan sikap positif terhadap upaya meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat, serta sikap

positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang sangat kuat. Motivasi intrinsik ini mendorong upaya terwujudnya harapan atau *ideals* yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Terbukanya wawasan akan menumbuhkan inspirasi tentang *ideas,* yaitu gagasan bagaimana mewujudkan ide tersebut. Kejelasan harapan dan cara mewujudkan harapan tersebut, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi solidaritas atau *friendship* untuk secara sinergis terjadi kerjasama diantara warga masyarakat. Menurut Margono Slamet (Sumardjo 2008), prasyarat untuk terjadinya partisipasi meliputi tiga aspek, yaitu: adanya kesempatan, kemauan dan kemampuan.

Masyarakat akan berpartisipasi dalam upaya bersama mewujudkan harapan bersama tersebut apabila terkondisi adanya prasyarat untuk terjadinya partisipasi berikut:

1. Adanya kesempatan, yaitu adanya kesadaran masyarakat tetang peluang untuk dapat berpartisipasi. Kesadaran bahwa harapan yang terbangun juga perlu dicapai, karena bila harapan tersebut tercapai masyarakat merasakan manfaat yang besar.
2. Adanya kemauan, yaitu keinginan atau sikap positif terhadap harapan (*ideals*) dan terwujudnya harapan itu, sehingga sikap ini akan mendorong tindakan masyarakat untuk mewujudkan harapan bersama tersebut.
3. Kemampuan, yaitu adanya kesadaran masyarakat bahwa dirinya merasa memiliki kemampuan untuk meraih kesempatan, serta dengan kemauan yang kuat untuk mewujudkan harapan tersebut. Kemampuan itu antara lain ditandai dengan kepemilikan keterampilan, tenaga, pikiran, dana dan materi untuk dapat berpartisipasi mewujudkan harapan masyarakat bersama.

Penyuluhan, pendampingan, fasilitator pemberdayaan, advokasi atau apapun bentuknya, disarankan mengenali potensi energi sosial ini, dan mengembangkannya. Dengan demikian suatu program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, didukung secara moral oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Program-program pembangunan seperti itulah yang cenderung mendapat partisipasi masyarakat yang tinggi dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya adalah bagaimana gagasan mengenai kesejahteraan bersama itu masih melembaga dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus sering ditemukan kesenjangan antara gagasan dengan realitas. Dengan semakin terbukanya desa, kadar solidaritas sosial lokal juga semakin menipis. Namun, diantara kondisi seperti itu, perlu digali adanya solidaritas sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan antara gagasan dengan realitas, sehingga dapat terjembatani ide-ide (ideas) kemakmuran bersama diantara warga masyarakat, sehingga menjadi persepsi bersama dan menjadi suatu idealisme bersama (ideals). Apabila di dalam masyarakat telah ada sesuatu kondisi yang diidealkan, maka besar peluang untuk mengembangkan solidaritas sosial dan kerjasama diantara masyarakat (friendships), untuk mewujudkan suatu kondisi idaman bersama tadi.

KESIMPULAN

Dalam menyongsong era globalisasi dan era lepas landas, setiap bangsa memerlukan SDM yang memiliki keunggulan prima: manusia yang memiliki kualitas tinggi yaitu di samping menguasai iptek juga harus memiliki sikap mental dan *soft skill* sesuai dengan kompetensinya. Modal sosial yang besar harus dapat diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Upaya peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping pengembangan masyarakat berkelanjutan perlu dilaksanakan secara spesifik lokasi dan mengedepankan aspek pengembangan energi sosial budaya alam.

Modal sosial dan pengetahuan lokal merupakan aspek kunci dalam pengembangan masyarakat dan dalam pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat adalah salah satu aktor kunci komunikasi pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan tersebut. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menyebabkannya lebih mampu secara proporsional memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Semakin tinggi wawasan, ketrampilan seseorang, maka semakin termotivasi untuk semakin berpartisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Ban VDAW, Hawkins HS. 1996. *Agricultural Extension* (second edition). Blackwell Science, Osney Mead, Oxford OX2 OEL.

Coleman J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology Supplement 94: S95-S120.

Craig G, Mayo (ed.) 1995. *Community Empowerment*: *A Reader in Participation and Development.* Zed Books. London.

Dasgupta P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washinton DC: The World Bank.

Ghosh PK. 1984. *Third World Development*: *A Basic Needs Aproach*. Westport: Greenwood Press.

Hikmat H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Narayan D. 1999. Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty. Washinton DC: World Bank.

Putnam RD. 1995. Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy Vol. 6 (1995) 1, 64-78.

Sumardjo. 1992. Pembangunan dan Kemiskinan di Timor Tengah Selatan. Dalam Sayogyo (penyunting) “Pembangunan dan Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timar”. Yogyakarta: Gama Press.

_____. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

_____. 2000. Mencari Bentuk Pengembangan Sumberdaya Manusia Mandiri dalam Pertanian Berbudaya Industri di Era Globalisasi. Hasil Penelitian Hibah Bersaing Kerjasama IPB dengan Dirjen Dikti Depdiknas RI. Bogor.

_____. 2006. Kompetensi Penyuluh. Makalah disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Batam.

_____. 2007. Metoda Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

_____. 2008. Penyuluhan Pembangunan sebagai Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat. Dalam Sudrajat dan Yustina "Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat". Sydex Plus. Bogor.

_____. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agribisnis. Makalah dalam Kuliah Umum Di Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. Banten.

Todaro PM, Stephen. 2009. *Economic Development*. Tenth Edition. New York: Pearson, Addison Wesley.

UNDP. 2003. *Human Development Report, 2003: Mellenium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty*. New York: Oxford University Press.

Widodo S. 2008. Kelembagaan Kapital Sosial dan Pembangunan. [terhubung berkala]. http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SDM PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Keppi Sukesi[2]

ABSTRACT

This paper aims to analyze the role of social capital in the process of community development, capacity-building strategies of social capital as the driving force of development, and the role of field worker in increasing the capacity of the public role of social capital. The paper was written based on the results of case studies conducted in two communities, East Java and East Nusa Tenggara (NTT). The results of the study show that social capital in community development processes play a very important, for it is necessary companion actor capable of improving community capacity and community participation. Accompanying human relation community development role in increasing the capacity of social capital's role as a communicator, facilitator, advocator, with the principle of partnership. Working on a voluntary basis, not merely profit oriented, active, participatory and empathetic. A good external relationships of Field Officers should place the role of mediator between the target and relevant external parties; To mobilize the public to be independent, Field worker need to cooperate and work together, providing exemplary and honest. Increasing the capacity of social capital necessary assimilation strategy with messages appropriate development, Field Officers who social sensitivity and empathize with the condition of the target communities. A suitable strategy is to encourage community participation and facilitation intensively.

Key words: *social capital, community development, community capacity, participation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Modal sosial mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses komunikasi pembangunan di suatu wilayah, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Di Indonesia, pengalaman menunjukkan bahwa modal sosial terkait erat dengan pembangunan, antara lain menyangkut tujuan dan strategi pembangunan.

Menurut Bourdieu (2003) modal sosial adalah sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang, berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan, serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal-balik. Modal sosial memiliki dua ciri, yaitu aspek dan struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut.

Modal sosial menurut Fukuyama (1999) adalah segala ihwal jaringan sosial yang mempunyai makna. Modal sosial berwujud non material, merupakan input yang sangat penting dalam proses produksi dan pembangunan. Aspek jaringan sosial, norma sosial, pertukaran dan norma sosial yang menautkan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masuk dalam kategori ini. Modal sosial berperan sangat penting dalam pembangunan, menjadi stabilisator sosial, mempercepat modernisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial dapat dilihat pada level rumah tangga, komunitas, regional dan nasional.

Narayan (2000) mengelompokkan empat perspektif dari modal sosial, yaitu komunitarian, jaringan, institusional dan sinergi. Perspektif komunitarian menganalisis modal sosial pada unit analisis organisasi dan kelompok sosial dalam

[2] Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

masyarakat. Perspektif jaringan menjelaskan modal sosial dari dua orientasi yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam berfungsi sebagai pengikat, keluar berfungsi sebagai penghubung. Perspekif kelembagaan menjelaskan bahwa pentingnya jejaring dalam masyarakat, menekankan pada kapasitas kelompok dan kepentingannya dipengaruhi oleh kualifikasi lembaga-lembaga formal yang mengitarinya. Perspektif sinergi merupakan gabungan antara perspektif jaringan dan institusional.

Krishna dan Uphoff (1999) mengemukakan dua kategori dalam modal sosial, yaitu 1) modal sosial struktural yang terdiri dari peraturan, peranan, jaringan dan prosedur, dan 2) modal sosial dalam dimensi kognitif , antara lain kepercayaan, resiprositas dan solidaritas. Selain itu terdapat dimensi relasional yang merujuk pada sifat hubungan (saling menghargai, persahabatan) yang menentukan perilaku anggota jaringan.

Bentuk-bentuk modal sosial adalah: 1) Kepercayaan (trust) merupakan orientasi manusia terhadap komunitas dan sesamanya; tersimpan sebuah harapan dan keyakinan untuk bekerjasama; 2) Modal sosial pertukaran. Mekanisme pertukaran dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial, misalnya pertukaran tenaga kerja, gotong-royong; 3) Jaringan sosial, terdiri dari jaringan pertautan antar isu–agenda kepentingan yang diartikulasikan dan jaringan dalam arti aktor. Jaringan merupakan sandaran kesepakatan norma-norma informal, bukan dalam hubungan otoritas; dan 4) Norma, merupakan aturan-aturan yang dibangun berdasarkan kesepakatan diantara masyarakat, menjadi acuan untuk berperilaku, bersifat informal. Norma sebagai modal sosial dapat ditelaah dari beberapa fenomena, antara lain ketaatan terhadap ketentuan.

Menurut Coleman, bentuk-bentuk modal sosial terdiri dari: 1) Kewajiban dan ekspektasi, dalam hubungan sosial pihak-pihak yang saling berhubungan masing-masing mempunyai kewajiban tertentu terhadap sesamanya. Pelaksanaan kewajiban akan menciptakan harapan bagi dirinya dan akan menjadi kewajiban dari pihak lain untuk memenuhinya; 2) Potensi informasi, setiap potensi informasi yang melekat pada relasi-relasi sosial juga merupakan suatu bentuk modal sosial. Relasi sosial berpotensi menyediakan informasi yang berharga, hal ini merupakan modal sosial; 3) Norma dan sanksi efektif; norma-norma yang dijalankan secara baik menjadi pedoman bagi masyarakat dan individu untuk berperan dengan rasa aman, hal ini menjadi modal sosial yang sangat penting; 4) Relasi wewenang; hubungan kekuasaan dan wewenang antara dua pihak yang saling mengisi dan saling berbagi merupakan modal sosial dalam suatu komunitas, karena kekuasaan dan wewenang menyangkut kendali bagi anggota suatu sistem sosial; 5) Organisasi sosial; tujuan adalah aspek penting dari organisasi sosial. Pencapaian tujuan secara efektif dicapai melalui organisasi sosial dan oleh karena itu merupakan modal sosial.

Modal sosial berperan menciptakan kemudahan tindakan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam suatu kegiatan produktif.

Tujuan

Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis peran modal sosial dalam proses pembangunan masyarakat, strategi peningkatan kapasitas modal sosial sebagai motor penggerak pembangunan dan peran SDM pendamping pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas peran modal sosial.

METODE

Kajian ini ditulis berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan di dua komunitas, yaitu Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di provinsi Jawa Timur dari 6 desa pendampingan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dipilih Desa Sumberbrantas Kota Batu sebagai kasus Pendamping Lapang (PL) untuk P3EL yang berhasil menggerakkan kelompok perempuan pedesaan melalui lembaga keuangan skala kecil. Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) Timor adalah kasus NTT dengan Program Agrosilvopastoral yang cukup berhasil menggerakkan masyarakat melalui pendampingan wanatani. Untuk Provinsi Jawa Timur data diambil melalui proses pendampingan selama 2 (dua) tahun. Pengambilan data di NTT dilakukan melalui wawancara mendalam dan kunjungan lapangan. Data disajikan secara diskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Peran Modal Sosial di Lokasi Kajian

Di Jawa Timur (kasus Desa Sumberbrantas) dapat diidentifikasi modal sosial yang memberikan kondisi tumbuh dan berkembangnya kelompok simpan pinjam P3EL, yaitu: gotong-royong, arisan dan pengajian. Bentuk-bentuk modal sosial tradisional tersebut kemudian diformalkan dalam bentuk pertemuan bulanan ibu-ibu dalam wadah seperti Kelompok Wanita Tani Bunga, PKK, POSYANDU, Program-program pedesaan dan Kelompok P3EL.

Modal sosial tersebut merupakan jaringan sosial di mana di dalamnya penuh dengan mekanisme pertukaran yang dilandasi rasa saling percaya dengan mengikuti norma-norma yang berlaku. Ketiga unsur itu harus menjadi satu kesatuan unntuk eksistensi modal sosial. Sebagai contoh, arisan merupakan wadah mengumpulkan uang yang bermakna sosial dan bisa dikatakan terdapat modal sosial di dalamnya, karena dengan arisan secara bergiliran anggotanya akan mendapatkan manfaat. Masing-masing harus jujur dan diikuti rasa saling percaya, apabila norma-norma arisan dilanggar akan mendapat sanksi dari kelompok. Kepatuhan masing-masingg anggota terhadap lembaga arisan merupakan modal sosial dalam perkumpulan keuangan tersebut. Demikian juga gotong-royong sebagai modal sosial dalam pertukaran tenaga kerja dan jasa untuk kepentingan umum ataupun kepentingan pribadi secara berbagi. Pengajian adalah modal sosial spiritual yang penting dalam mengikat masyarakat sebagai satu kesatuan, satu sistem yang kompak dan satu jaringan sosial sebagai subyek pengembangan masyarakat.

Potensi modal sosial sebagai wadah dinamika masyarakat menjadi modal dasar yang penting dalam pembentukan lembaga-lembaga formal di Desa Sumberbrantas yaitu Kelompok Wanita Tani Bunga, PKK, POSYANDU dan P3EL. Kelompok Wanita Tani Bunga dibentuk karena kebutuhan masyarakat Sumberbrantas yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan tanaman utama sayur dan tanaman hias di pekarangan yang dikelola kaum perempuan. Kelompok ini merupakan jaringan sosial di tingkat desa dan bahkan sampai ke luar desa, terutama dalam pemasaran. Rasa saling percaya diantara kelompok maupun konsumen bunga harus ada dimana salah satu menjadi produsen bunga, yang lain adalah konsumen. Kelompok ini akan bertahan apabila ada modal sosial berupa

spirit berkelompok, dilindungi oleh norma-norma yang ditaati dalam mencapai tujuan kelompok.

PKK adalah kelompok sosial bagi kaum perempuan pada umumnya di Desa Sumberbrantas yang bertujuan menggerakkan kaum perempuan untuk mencapai kesejahteraan keluarganya. POSYANDU merupakan kelompok sosial yang menghimpun kaum perempuan dalam pelayanan kesehatan bagi anak BALITA. PKK dan POSYANDU merupakan kegiatan yang dikembangkan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat. Di Desa Sumberbrantas, aktivitas PKK dan POSYANDU cukup aktif karena peran pengurus dan tokoh masyarakat yang sangat aktif, dan berupaya membentuk jaringan kekeluargaan yang kuat, bertukar ide-ide dan informasi, adanya aktivitas konkrit dan mengembangkan norma–norma yang mendorong untuk bergiliran aktif dalam aktivitas kerumahtanggaan dan sosial kemasyarakatan .

P3EL adalah kelompok perempuan pengembang ekonomi lokal, beranggotakan mula-mula 30 rumah tangga, setiap bulan anggota bertambah, dengan aktivitas utamanya mengembangkan simpan pinjam bagi anggota. Modal awal sebesar Rp 25.000.000,00 merupakan dana hibah dari provinsi. Uang tersebut diputar dalam bentuk pinjaman perorangan yang tergabung dalam kelompok beranggotakan sepuluh orang. Jumlah anggota kelompok terus bertambah, sesuai dengan pertambahan peminjam baru. Syarat anggota adalah memiliki usaha produktif misalnya pembuat kue, penjahit, pedagang, catering, pengrajin dan lain-lain. Bunga pinjaman ditetapkan secara musyawarah sebesar 1,5 persen. Pengurus bekerja secara sukarela. Pendamping lapangan berasal dari Perguruan Tinggi dan Kantor Pemberdayaan Perempuan. Ketiga unsur terakhir ini bekerjasama dalam berlangsungnya P3EL. Pengurus adalah modal sosial berasal dari internal kelompok yang sangat berperan dalam pengembangan kelompok.

Di Provinsi NTT sebagaimana dikemukakan Abdurrahman (2009), terdapat modal sosial perdesaan dalam bentuk institusi sosial pertanahan adat, kekerabatan, pemerintahan desa, kelompok Usaha Bersama (KUB) Nekmese, Kelompok Tani, Kelompok Kerja Bergilir (KKB). Adat pertanahan diatur oleh kepala adat , Raja atau Fetor, dan Pah Tuaf (tuan tanah) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Ama Tobe yang bertugas dalam kerohanian. Peran yang dilakukan adalah: 1) memberikan petunjuk tentang tanah-tanah yang cocok untuk membuka areal ladang baru; 2) memberikan legitimasi hukum adat tentang hak penguasaan dan penggarapannya. Institusi kekerabatan NTT yang patrilineal juga berperan dalam pembangunan, terutama dalam hal mengatur pewarisan, penyedia tenaga kerja dan dukungan sarana produksi.

Pemerintahan desa adalah lembaga yang penting dalam menghubungkan masyarakan desa di NTT dengan pihak luar atau eksternal. Pemerintahan desa adalah yang secara formal berperan sebagai jembatan perantara diantara masyarakat, baik internal maupun eksternal, penggerak warga masyarakat dalam program-program pembangunan dan mediator penyelesaian masalah-masalah dan konflik diantara warga masyarakat.

KUB dengan aktivitas simpan pinjam dapat berjalan apabila norma-norma kelompok dipatuhi, sehingga selain secara finansial berfungsi membantu masyarakat. KUB juga mempunyai fungsi sosial penggerak pembangunan. Demikian juga Kelompok Tani, yang pembentukannya diprakarsai dari pihak luar, tetapi

aktivitasnya menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga dapat digerakkan sebagai modal sosial kelembagaan dengan fungsi dan norma-norma yang jelas. Melalui wadah ini, petani dapat belajar, berkomunikasi dan bekerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani, peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat penting.

KKB atau disebut juga arisan kerja, dibentuk oleh petani dengan tujuan memudahkan pengelolaan dan pekerjaan pertanian, Anggota KKB sebanyak tujuh sampai sepuluh orang petani, sifatnya tidak formal, sehingga sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan diaktifkan kembali apabila dibutuhkan. Kebutuhan yang sama menjadi pengikat dari kelompok ini.

Kepercayaan, pertukaran, jaringan sosial, norma menjadi ciri utama dari modal sosial tersebut di atas, di Jawa Timur maupun di NTT. Selama ciri tersebut masih berfungsi efektif, maka sebagai modal sosial akan berfungsi juga dalam menggerakkan masyarakat, mewujudkan fungsi komunikasi pembangunan dan menjadi pengendali perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan.

Peran Pendamping Lapangan dalam Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial

Pendamping Lapangan P3EL Desa Sumberbrantas Jawa Timur

P3EL adalah kelompok perempuan pengembang ekonomi lokal, beranggotakan mula-mula 30 rumahtangga, dalam dua tahun berkembang menjadi 42 anggota. Pendamping P3EL di Sumberbrantas adalah dari Perguruan Tinggi bertugas mendampingi pembuatan proposal, rembug desa/musyawarah kelompok, pembukuan, keuangan, pengembangan usaha dan pembinaan lembaga/kelompok. Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Batu bertugas memonitor langsung kegiatan di lapang, mengevaluasi, menerima laporan untuk selanjutnya diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan pemecahannya. Pendamping Lapangan yang secara langsung berhadapan dengan sasaran sehari-hari adalah pengurus di tingkat desa, bertanggungjawab terhadap bidang pemberdayaan perempuan di tingkat kota. Semua aktivitas tersebut secara legal diketahui oleh Kepala Desa.

Dengan kegiatan utama simpan pinjam, PL harus bekerja sangat hati-hati. Pertemuan dilakukan sebulan sekali, pada pertemuan PKK atau pengajian kadang-kadang PL memberikan penjelasan. Pada akhir tahun uang harus terkumpul untuk kemudian dialokasikan kembali. PL mengibaratkan arisan yang memang sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu, sehingga anggota berdisiplin membayar setiap bulan. PL juga secara informal memberikan pertimbangan tentang usaha ekonomis yang dilakukan anggota. Karena letaknya di desa, PL selalu mendapat pengaduan ataupun masalah yang dihadapi, terutama soal angsuran. Keteladanan, kejujuran, rela dan berdisiplin. Bagi perempuan pengusaha kecil, modal sangat membantu perputaran usaha yang kadang-kadang “ramai” kadang-kadang “sepi.”

Dapat dikemukakan bahwa PL di Desa Sumberbrantas dalam kegiatan P3EL sangat berperan sebagai fasilitator, komunikator, mediator, pemantau dan evaluator.

YMTM (Yayasan Mitra Tani Mandiri) Kefamenanu – Timor Tengah Utara

Kegiatan/proyek: AGROSILVOPASTORAL

Lokasi 4 kabupaten yaitu TTU, Ngada, Nagekao, Belu, dengan jumlah 43 desa. Desa lokasi yang dikaji adalah Desa Oenain dan Fafinisufi, yaitu desa kritis, kering dan petani berusahatani secara tebas bakar.

Setelah lima tahun didampingi sekarang tidak lagi kritis, hijau dan produktif. Pendekatan yang dilakukan adalah menggerakkan partisipasi masyarakat melalui teknologi alternatif tebas bakar, yaitu konservasi tanah dan air; pembuatan embung, terasering, kebun tanaman pangan, tanaman umur panjang dan ternak. Pembentukan Kelompok Tani, tergabung dalam LOPOTANI (semacam GAPOKTAN); Lopotani membentuk asosiasi yang menangani pemasaran hasil-hasil pertanian. Dana Lopotani diperoleh dari petani. Asosiasi juga memiliki unit simpan pinjam. Dengan demikian posisi tawar petani meningkat, harga ditentukan bersama antara petani dan pedagang, sehingga dapat menekan pengijon. MTM menjadi lembaga pendidikan dan konsultasi. Terdapat tenaga magang dari LSM di Timor dan juga Timor Leste. Mempunyai hubungan yang baik dengan Dinas Pertanian dan BPMD. Di bidang kesehatan MTM menangani masalah air, gizi keluarga; Angka Kematian Ibu dan Anak dan kesehatan masyarakat. Dapat dikatakan aktivitas MTM bersifat lintas bidang dan menyeluruh sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pimpinan YMTM adalah sistem bergilir. Yayasan MTM berdiri sejak tahun 1988.-sekarang. Dalam rentang waktu tersebut telah berganti dua kali kepemimpinan, pertama Ir. Yoseph Asa, dan kedua Ir. Vincent Nurak. Wilayah binaan sampai dengan saat ini adalah empat kabupaten, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Negekeo.

MTM didirikan atas keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang hidup di daerah lahan kering yang terkenal tandus, berbatu dan terjal, serta rawan kebaran (akibat tebas bakar). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah mencegah budaya tebas bakar. Bertumpu pada kenyataan di atas maka didesain model *agroforestry* (perhutanan dengan aspek sistem budidaya lorong) mencakup aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Model ekonomi yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan sistem *agroforestry*, mengadakan pelatihan, pembentukan kelompok. Kelompok menentukan lokasi, membersihkan, membuat terasering, menaman tanaman tahunan sebagai pembatas larikan yang berfungsi sebagai pakan ternak, kayu bangunan dan tanaman pangan berupa *canegrass*, lamtoro, gamal, gala-gala, mahoni, kaliandra, kemiri, vanili, sirih, jeruk, pisang dan nenas. Pada celah (lorong antar baris) ditanami tanaman pangan berupa jagung, ubi kayu dan kacang-kacangan. Pada tahap awal membutuhkan waktu tujuh tahun, sementara replikasi hanya membutuhkan waktu tiga tahun.

Konsep ini dipandang sangat baik, karena dalam jangka pendek memanfaatkan tanaman pangan untuk konsumsi, kemudian memelihara ternak sapi ketika tanaman pakan telah siap. Hal lainnya memelihara ternak berupa babi dan kambing. Hasil ternak dijual, sebagian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagian untuk kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan sebagian lainnya disimpan di kelompok dalam bentuk simpan pinjam. Upaya pemasaran ternak dilakukan secara berjenjang, sepuluh orang membentuk satu kelompok tani, satu desa terdiri dari 10-12 kelompok tani, kelompok tani beberapa desa dikoordinir oleh satu 'Lopotani' (lumbung pangan, kalau pemerintah gapoktan), beberapa Lopotani bernaung di asosiasi. Asosiasi bertugas mencari dan mengawasi

pemasaran sapi. Dengan asosiasi ini harga jual ternak dapat mencapai Rp 14.000,00 per kg – Rp 17.700,00 per kg. Bila dijual sendiri hanya mencapai Rp 10.000,00 per kg. Hal ini dilakukan untuk mencegah sistem ijon. Sejumlah dinas instansi datang melakukan magang di MTM, misalnya Tananua dan Pemerintah Timor Leste. Dalam hal ini sudah beberapa angkatan yang dilakukan.

Desa Oenain: ketinggian sekitar 1000 m kondisi kering. Kegiatan usahatani lorong; *multi cropping* seperti Lamtoro, Suryan, Pisang dan Mahoni.

Tanaman pangan jagung. Teras bagus, partisipasi petani, YMTM mendampingi usaha ternak sapi dan babi. Desa Fafinisufi dengan ketinggian hampir sama dengan desa Oenain yaitu lahan berbukit sangat miring, tanaman keras yang diusahakan mahoni, asam, tanaman pangan (nenas, Lombok, jeruk) dan rumput. Ternak yang dipelihara adalah sapi dan babi. Penduduk daerah ini dulu akan ditransmigrasikan; karena berhasil dibina YMTM, tidak jadi ditransmigrasikan. Petani mempunyai perencanaan kebun yang baik, simpan-pinjam kelompok tani laki-laki dan perempuan. Modal awal dari iuran petani Rp 6.600.000,00 dan saat ini berkembang menjadi Rp 18.000.000,00. Yang boleh meminjam hanya anggota kelompok dengan bunga dua persen per bulan. Hasil kebun digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan; hasil sapi digunakan untuk menyekolahkan anak.

YMTM berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, advokasi, bersama-sama dengan pempinan desa dan tokoh masyarakat setempat. Di lokasi proyek ditempatkan PL yang tinggal di desa proyek. Di Desa Oenain pendamping lapangnya adalah perempuan, yaitu sudah tiga tahun tinggal di desa dan dibangunkan rumah oleh masyarakat untuk tempat tinggalnya.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping

Mempelajari dua tipe SDM Pendamping Lapangan (P3EL dan YMTM), Nampak bahwa kualitas dan kinerja SDM Pendamping Pengembangan Masyarakat sangat diperlukan dalam menggerakkan masyarakat.

Siapa pendamping, menjadi kriteria yang harus diperhatikan terutama dalam hal kualifikasi dan orientasi kerjanya. Di dua lokasi kajian pendidikan PL adalah Sarjana, bahkan relawan PL di Desa Sumberbrantas yang berstatus ibu rumahtangga berpendidikan Sarjana Pertanian, dengan perekonomian yang cukup dan secara sukarela aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Petugas di tingkat kota, melakukan pendampingan P3EL karena tugas formalnya di kantor. PL formal ini harus berkomunikasi dengan baik dengan relawan di tingkat desa yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat dan kelompok P3EL khususnya. PL di YMTM – NTT adalah sekelompok anak muda dengan pikiran ideal mengembangkan masyarakat. Orientasi kerjanya tidak semata-mata untuk mendapatkan upah/gaji tetapi bekerja untuk idealisme dan cita-cita memajukan masyarakat. Pilihan pekerjaan itu mula-mula ditentang oleh keluarganya yang melihat aktivitas LSM atau relawan bukan sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Akan tetapi orientasi kerja yang sungguh-sungguh yang didasari keyakinan bahwa bekerja bukan hanya “di kantor” telah memberikan hasil konkrit bagaimana menggerakkan masyarakat. PL yang berorientasi pada tugas tidak secara langsung mampu menggerakkan masyarakat.

Bagaimana kinerjanya, dapat dijelaskan dengan intensitas komunikasi antara PL dan masyarakat atau kelompok dampingan, relasi sosial yang dibangun, umpan-balik yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok dampingan sebagai respon terhadap kinerja PL. Dua kajian menunjukkan intensitas kehadiran yang tidak formal dan tidak terbatas jam kerja formalnya telah menunjukkan hasil sangat positif. Relawan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di lokasi kelompok pendampingan, sehingga intensitas pertemuan secara informal dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Relasi sosial yang dibangun dalam berkomunikasi dengan anggota kelompok adalah terbuka atau transparan, dimana anggota dapat mengetahui perputaran modal melalui sistem pembukuan yang tertib. Komunikasi timbal-balik dan *reward* positif yang diberikan anggota kelompok nampak ketika relawan ingin mengundurkan diri dan tidak diterima oleh kelompok. Hal ini menunjukkan kepercayaan anggota yang tinggi yang menjadi pendorong relawan untuk tetap bertahan melaksanakan pekerjaannya.

Serupa dengan P3EL di Jawa Timur adalah kinerja PL dalam aktivitas YMTM di NTT. Seorang Sarjana perempuan muda tinggal di desa pendampingan, sehingga memungkinkan secara intensif berkomunikasi dengan petani atau masyarakat yang didampingi sesuai permasalahan yang dihadapi. Tinggal di desa ini pada awalnya bukan suatu pilihan, tetapi keinginan kelompok dampingan yang bergotong royong membuatkan rumah tinggal untuk pendamping. Suatu respon yang membanggakan bagi relawan yang bekerja di desa. Komunikasi secara langsung, menangani masalah bersama-sama dengan masyarakat, bekerja profesional dan berjejaring dengan petugas formal terkait adalah modal dasar menggerakkan masyarakat.

Komunikator dan fasilitator adalah dua peran penting PL dalam menggerakkan masyarakat. Sebagai komunikator berarti harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat, tidak menggurui, menunjukkan keteladanan dan kejujuran. Mengkomunikasikan dan menjabarkan program kegiatan sampai dimengerti dan dipahami masyarakat yang didampingi. Kasus P3EL dengan aktivitas simpan pinjam pada saat sekarang sangat berisiko untuk tidak dikembalikan oleh masyarakat yang merasa bahwa uang dari pemerintah adalah uang rakyat sehingga tidak perlu dikembalikan. Disinilah peran komunikator sangat penting bahwa kalau uang tidak dikembalikan, maka aktivitas akan berhenti. Keterbukaan dalam kelompok memberikan sangsi berupa “rasa malu” bagi anggota yang tidak mengangsur uang pinjamannya. Untuk melatih disiplin, PL harus tega mengingatkan anggota yang menunggak pinjamannya, pada saat mereka mengadakan pertemuan sebulan sekali. Sebagai fasilitator, PL menempatkan diri sebagai mitra, bukan guru, membiarkan anggota kelompok berkembang dengan usaha kecilnya, dengan kepercayaannya akan mengembalikan pinjamannya.

YMTM berpendapat bahwa PL sangat penting, maka di lokasi proyek harus ada PL yang secara intensif memberikan advokasi/ pendampingan pada masyarakat. PL menempatkan diri sebagai mitra petani, bersama-sama melakukan pekerjaan di lokasi, membuat perencanaan melalui musyawarah, melakukan pembuatan teras, embung, menanam pohon secara bergiliran di antara anggota, merawat tanaman dan merencanakan pemasaran. Petani berkomunikasi dengan PL tentang masalah-masalah yang dihadapi. PL mengkomunikasikan apa yang terjadi di masyarakat dampingan dengan pihak terkait, terutama mencari jalur jalur pemasaran hasil. Secara ringkas PL dengan perannya sebagai mitra tani, advokator, fasilitator dan

komunikator sangat penting dalam menggerakkan petani untuk secara mandiri meningkatkan kualitas hidupnya.

Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Pendamping Lapang

Proses transfer inovasi kepada masyarakat sebagai sasaran memerlukan agen pembawa inovasi yang berkemampuan, sifat inovasi yang ditransfer berpengaruh terhadap cepat-lambatnya penerimaan masyarakat. Modal sosial merupakan modal dasar yang penting dalam proses tersebut. Adapun ciri inovasi akan mudah diadopsi dengan memperhatikan apakah inovasi tersebut baru atau belum dikenal sasaran; secara teknis dapat dikerjakan; secara ekonomis terjangkau; tidak bertentangan dengan nilai dan norma serta adat istiadat setempat.

Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kapasitas modal sosial, adalah apabila modal sosial dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi institusi/pranata yang dibutuhkan. Meningkatkan kapasitas modal sosial perlu strategi asimilasi dengan pesan-pesan pembangunan yang sesuai. PL yang berkepekaan sosial dan berempati dengan kondisi masyarakat sasaran. Strategi yang cocok adalah mendorong partisipasi masyarakat dan fasilitasi secara intensif.

PL dapat berasal dari dalam komunitasnya, ataupun dari luar. Pendamping lapang dari dalam mempunyai kelebihan terhadap pengenalan masyarakat, tetapi kedekatan juga berpengaruh terhadap kewibawaan pendamping lapang. Pendamping dari luar mempunyai ketajaman untuk mengenali masalah sasaran, tetapi kurang mengenal secara mendalam. Mempertukarkan kekurangan dan kelebihan menjadikan keseimbangan pendamping lapang yang ideal dalam menggerakkan masyarakat melalui pengembangan modal sosial yang ada.

Kasus desa binaan YMTM menunjukkan bagaimana strategi yang diambil oleh PL sehingga berhasil menggerakkan masyarakat. Hasilnya sebagai berikut:

Desa Oenain

Desa Oenain adalah daerah kering, tandus dan terjal, dengan sistem terasering telah ditanami berbagai jenis tanaman pakan, kayu bangunan dan tanaman pangan seperti, gamal, gala-gala, *canegrass*, lamtoro, mahoni, kemiri, ubi kayu, pisang dan nenas, sedangkan jagung dan kacang-kacangan merupakan tanaman sela telah dipanen.

Pengurus kelompok memberikan penjelasan bahwa kelompok binaan MTM di Desa Oenain dimulai sejak tahun 2000 sampai sekarang (2009). Dalam kurun waktu 2000-2003, menghijaukan areal seluas delapan ha. Mulanya hanya dua kelompok binaan di desa ini, menyusul empat kelompok dan tambah lagi tiga kelompok, sehingga sampai dengan saat ini berjumlah sembilan kelompok. Pada periode 2003-2009 telah menghijaukan areal seluas 110 ha, dari target 2000 ha yang akan diselesaikan pada tahun 2014.

Tenaga kerja berasal dari dalam kelompok dan bekerja secara bersama-sama (gotong-royong) atau secara bergantian (shift). Setiap dua jam berganti ke areal milik anggota yang lain. *Shift* ini tidak sulit dilaksanakan karena lokasinya terletak pada satu hamparan. Peralatan yang digunakan adalah peralatan sederhana seperti parang, linggis dan cangkul.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh seorang ibu anggota dari 'KELOMPOK INGIN MAJU'. Setelah mendapatkan sosialisasi, penjelasan dan latihan, anggota dapat melakukan sendiri. Iuran sebesar Rp 5.000,00 per anggota untuk memupuk kas kelompok. Melalui kelompok dirasakan ada perbaikan taraf hidup rumah tangga. Hasil usaha kelompok digunakan untuk membeli babi, sapi, kambing dan juga usaha tenun kain. Sampai sekarang dalam kelompok memiliki sapi 12 ekor, babi delapan ekor dan modal kelompok Rp 13.000.000,00. Modal kelompok dapat dipinjam oleh anggota untuk kebutuhan biaya anak sekolah atau kebutuhan lain yang sangat mendesak. Besar pinjaman maksimal Rp 1.000.000,00 dengan bunga dua persen dengan jangka waktu pengembalian lima bulan. Penjelasan dilanjutkan lagi oleh salah seorang ibu (Fransiska Besi) mewakili anggota yang lainnya merasakan ada manfaat yang besar setelah masuk dalam kelompok binaan MTM, yaitu manfaat memupuk kas kelompok dari setiap anggota sejumlah Rp 5.000,00. Sekarang memelihara babi 18 ekor dan sapi 18 ekor. Modal kelompok Rp 6.650.000,00 dapat dipinjam oleh anggota untuk kebutuhan biaya anak sekolah atau kebutuhan lain yang sangat mendesak. Besar pinjaman maksimal Rp 1.000.000,00 dengan bunga dua persen dengan jangka waktu pengembalian lima bulan.

Desa Fafinisufi

Di desa ini MTM membentuk 13 kelompok binaan beranggotakan 176 orang (terdiri dari enam kelompok ibu-ibu dan tujuh kelompok bapak-bapak). Seorang ibu, wakil dari 'KELOMPOK STELA MARIS' menyampaikan bahwa setelah mengikuti MTM keadaannya dirasakan lebih baik dari sebelumnya. Keluarga ini menanam jagung, kacang-kacangan, singkong, ubi jalar, talas, nenas, sayur-sayuran, mente, kemiri dan pisang. Masing-masing anggota memelihara sapi, babi, kambing, dan ayam. Terdapat 12 ekor sapi yang siap timbang. Setiap anggota kelompok menanam 1000 pohon mahoni. Masih tersedia lahan untuk usahatani, namun perlu dipikirkan pemisahannya (sertifikat). Hal lainnya telah memupuk modal kelompok yang dapat dipinjam oleh anggota untuk kebutuhan biaya anak sekolah atau kebutuhan lain yang sangat mendesak. Besar pinjaman maksimal Rp 1.000.000,00 dengan bunga dua persen dengan jangka waktu pengembalian tiga bulan.

Kondisi yang baik tersebut merupakan hasil kerja keras dengan strategi yang tepat melalui peran pendamping lapang. Serupa dengan kondisi NTT adalah strategi Pendamping Lapang P3EL di Desa Sumberbrantas, sebagai "orang dalam" tidak terlalu sulit untuk berempati kepada sasaran dampingan, tetapi harus disiplin, tertib administrasi, jujur dan memberikan keteladanan.

KESIMPULAN

Modal sosial dalam proses pembangunan masyarakat berperan sangat penting, maka diperlukan aktor pendamping masyarakat yang berkemampuan meningkatkan kapasitas modal sosial dan partisipasi masyarakat.

SDM pendamping pengembangan masyarakat berperan dalam meningkatkan kapasitas peran modal sosial sebagai komunikator, fasilitator dan advokator, dengan prinsip kemitraan. Bekerja secara sukarela, tidak semata-mata berorientasi keuntungan, aktif, partisipatif dan berempati. Hubungan eksternal yang baik menempatkan Petugas Lapang hendaknya berperan sebagai mediator antara

sasaran dan pihak luar terkait dan menggerakkan masyarakat agar mandiri dimana PL perlu bekerjasama dan memberikan keteladanan dan jujur.

Strategi peningkatan kapasitas modal sosial sebagai motor penggerak pembangunan, diarahkan pada penempatan modal sosial yang dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi institusi/pranata yang dibutuhkan. Meningkatkan kapasitas modal sosial perlu strategi asimilasi dengan pesan-pesan pembangunan yang sesuai dengan Petugas Lapang yang berkepekaan sosial dan berempati dengan kondisi masyarakat sasaran. Strategi yang cocok adalah mendorong partisipasi masyarakat dan fasilitasi secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman M. 2009. Dinamika Rasionalitas–Petani dan Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan Pedesaan. Disertasi PPS Fak. Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Bordieu P. 2003. The Forms of Capital. Review, Universitas Brawijaya.

Fukuyama F. 2000. *Modal Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Hidayati S. 2009. Dinamika Perbahan Masyarakat di Sekitar Suramadu. Makalah, PPS Fak. Pertanian Universitas Brawijaya.

Mahdi EH. 2006. Social Capital Review. Universitas Brawijaya Malang.

Sukesi K. 2007. Pendampingan P3EL di Provinsi Jawa Timur. Laporan Pendampingan. BAPEMAS Prov. Jawa Timur.

Sukesi K, Seran S. 2009. Analisis Dinamika Masyarakat NTT. Laporan Penelitian.

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Djoko Susanto[3]

ABSTRACT

Based on normal situation effective and successful community development are indicated by several evidence, namely: improvement of welfare state of the whole segments of the community, development of sosial trust, improvement of awareness of the community with regard to their potentials, their real needs, their problems in achieving their needs, and getting alternatives of solution to break their problems by utilizing their potentials, people are innovated to get better lives, and finally their have great motivation to be self reliance and develop more inter-dependency with other systems. To obtain such qualified community development the role of so-called as partners or insider and outsider change agents of the community is absolutely needed. Commonly, the community cannot sharply know themselves very well. They need somebodies, insider and or outsider individuals who professionally have potentials and competencies to develop them in such, that through working together they may achieve better lives. The community partners in development are those individuals who have prepared themselves through various learning processes, who ideally have unique characteristics such as: high empathy, highly care to others, sensitive, have qualified personality, have highly capability to utilize their senses, have highly capability in communication, and very consistent in talking and doing which the community are eager to trust and express their needs. But unfortunately, based on field studies done by several doctorate candidates show that the partners of the community on development have not possessed such high qualification. Most of them in some district areas in Jawa and outer Jawa Island need more training to improve their sosial capital capacity, and their quality of human resources as well. Consequently, we need smart and diliguent strategy on how to improve competencies of the partners of the community development through learning processes in such, that sooner or later their roles will provide positive impact on the betterment of quality of life of the community.

Key words: *social capital, capability, learning processes, qualified, empathy, care to others*

PENDAHULUAN

Mengapa di dalam pengembangan masyarakat diperlukan peran pendamping? Apakah tidak mungkin masyarakat berpotensi mengembangkan dirinya, misalnya melalui berbagai kearifan lokal yang secara turun-temurun telah ada dan dimiliki oleh masyarakat bersangkutan? Sementara itu, dalam kenyataan di lapangan ditemukan adanya kelompok masyarakat yang cenderung tidak mau, bahkan tidak terdorong untuk berubah, misalnya hal ini kita temukan pada kelompok masyarakat yang tergolong KAT (Kelompok Adat Terasing), seperti Suku Baduy Dalam Suku Baduy Luar, Suku Anak Dalam dan lainnya.

Peran dari pendamping akan tampak nyata dan diperlukan, tatkala di dalam sistem sosial masyarakat terdapat indikasi adanya rasa ketidakpuasan pada kalangan warga masyarakat setempat. Ketidakpuasan yang muncul itu umumnya berakar pada adanya kebutuhan masyarakat yang belum atau tidak terpenuhi. Indikasi dari adanya ketidakpuasan warga masyarakat dapat diwujudkan melalui perilaku sosial yang mudah diamati, seperti pemblokiran jalan desa, unjuk rasa, pembakaran ban bekas dan sejenisnya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya seperti adanya ketidakadilan, penindasan, penyerobotan dan pemerkosaan hak-hak terhadap penggarapan/pemilikan lahan

[3] Persatuan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI)

dan lainnya dewasa ini semakin marak muncul dalam masyarakat, juga adanya konflik sosial, tawuran antarwarga masyarakat dan sejenisnya. Secara arif gejala atau gejolak sosial seperti itu perlu disikapi positif, di mana hal itu menunjukkan, bahwa masyarakat semakin paham akan hak-haknya untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih berkeadilan, serta semakin sadar akan kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk diperhatikan.

Satu kondisi relatif umum ditemukan dalam mayoritas masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil adalah rendahnya kesadaran mareka akan berbagai potensi internal (sumber daya manusia atau SDM) dan potensi eksternal (sumber daya alam atau SDA) yang mereka miliki. Sementara kalangan yang cenderung mempertahankan *status quo* mencoba mempengaruhi persepsi publik, bahwa gejala/gejolak sosial itu adalah ulah dari para provokator yang ingin mengambil untung dari kemelut tersebut. Dalam hal ini, pendamping pengembangan masyarakat perlu waspada, jangan-jangan ia terkategorikan sebagai salah seorang provokator itu oleh kalangan yang kurang arif ini. Posisi dan peran Pendamping pengembangan masyarakat hendaklah juga sebagai tenaga-tenaga yang turut menumbuhkembangkan wacana dan kegiatan reformasi perilaku pembangunan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disajikan hasil pemikiran dan telaahan hasil-hasil penelitian disertasi beberapa orang Doktor, tentang bagaimana seyogyanya para pendamping pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan kompetensi dan keprofesionalannya, khususnya dari perspektif kapasitas modal sosial dan kualitas SDM sedemikian rupa, sehingga selaku mitra, pendamping dan kerabat masyarakat cukup netral dan mampu memposisikan dirinya dalam masyarakat yang butuh perubahan positif dan berkeadilan di tengah bergejolaknya kepastian hukum yang masih serba membingungkan dan penuh ketidakpastian dewasa ini.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Mengapa masyarakat perlu berkembang dan/atau dikembangkan? Pengertian pengembangan masyarakat atau *community development* (CD) adalah ungkapan lain dari pembangunan masyarakat (Ife 1995). Apa artinya berbagai pembangunan seperti sarana, prasarana yang bersifat pembangunan fisik (gedung-gedung, perumahan, mal-mal dan toserba dan lainnya), pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan lainnya dilakukan, tetapi pembangunan sosial dan peningkatan kapasitas SDM terabaikan. Para pakar dalam bidang ilmu-ilmu sosial di masa Orde Baru pernah menyesalkan adanya perhatian dan kebijakan pemerintah yang terlalu terfokus pada bidang pembangunan ekonomi, dan relatif mengabaikan/'menganak-tirikan' pembangunan sosial kemasyarakatan. Pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan mengejar partumbuhan (economic growth) telah mewariskan berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam dalam masyarakat, bahkan masih terasa sisa-sisanya sampai sekarang. Buktinya masalah kemiskinan tidak kunjung reda secara nyata, dengan indikasi yang dapat diamati secara nyata, misalnya meningkatnya anak-anak dan pemuda remaja jalanan, jumlah pencari kerja (sarjana dan non sarjana) yang relatif meningkat, semakin maraknya demo-demo publik (masyarakat dan mahasiswa) yang digelar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan wakil-wakil rakyat dalam

berbagai bidang khususnya ekonomi dan hukum, serta masalah sosial lain yang semakin beragam, baik kuantitas maupun intensitasnya.

Masyarakat di berbagai segmen membutuhkan dan sangat mendambakan hidup dan berkehidupan secara wajar, tenteram, damai dan berkeadilan. Semua kebutuhan itu hanya dapat dicapai jika setiap anggota masyarakat memiliki kepastian dan pengakuan tentang hak-haknya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam masyarakat di mana hidup. Harapan setiap anggota masyarakat seperti itu bersifat normatif dan sah-sah saja. Namun, dalam kenyataan di lapangan ditemukan, tidak semua anggota atau warga masyarakat memiliki kesadaran yang sama berkaitan dengan hak-hak tersebut. Pada kalangan segmen masyarakat miskin misalnya, ditemukan bahwa mereka tidak mudah membedakan antara 'nasib' dan 'takdir' (Sugiharto 2007), sehingga kemiskinan itu melahirkan sikap kepasrahan dan cenderung mematikan motivasi bahwa sesungguhnya berhak untuk berubah ke arah hidup yang lebih baik. Masalahnya siapa yang peduli dan tergerak hatinya untuk mengubah nasibnya dan bagaimana cara yang dapat dilakukan agar diberdayakan hidupnya menjadi lebih baik?

Masyarakat, khususnya yang tergolong segmen yang memiliki asset dan akses rendah terhadap berbagai pelayanan publik, segmen masyarakat miskin dan duafa, baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan perlu dikembangkan sedemikian rupa agar merasa memiliki hak hidup dan berkehidupan layak, merasa diperhatikan, dihargai, dimanusiakan dan dilimpahi keadilan, serta pada gilirannya secara bertahap akan lebih baik kehidupannya. Arah pengembangan masyarakat yang tergolong baku adalah penyadaran akan potensi (SDA dan SDM) yang dimiliki, penyadaran akan masalah yang dihadapi, dan menumbuhkembangkan kompetensi sehingga mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi menggunakan potensi yang dimilikinya. Semua kegiatan penyadaran itu tiada lain adalah serangkaian proses belajar yang panjang, *time-and-energy consuming*, yang dapat dilakukan oleh Pendamping handal dan profesional serta tergolong *reformis.*

Seperti dinyatakan oleh Misra (1981), pengembangan masyarakat hendaklah didasarkan kepada empat hal berikut, yaitu: (1) Keterjangkauan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua orang secara berkelanjutan; (2) Pengakuan dan saling menghargai atas harga diri masing-masing unsur dalam masyarakat; (3) Bebas dari segala bentuk tirani dan kekerasan; (4) Pemilikan kedamaian hidup yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Guna menciptakan kondisi masyarakat yang damai, sejahtera, berkeadilan dan peduli akan kehidupan masa depan *berwawasan futuristik,* serta terlindungi oleh pemerintahan yang *clean, credible dan accountable,* maka perlu disadarkan akan hak-hak dasar (basic human rights) yang dimiliki, yang sifatnya universal (Donnelly 1989), yaitu hak atas pangan (Sen 1982), di samping penyadaran atas kewajiban dan tanggungjawab mereka sesuai dengan posisi dan peran masing-masing anggota masyarakat. Pendamping perlu turut mengisolir adanya pengaruh dan *interest* oknum yang cenderung memelihara kebodohan, ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat akan hak-hak mereka yang mendasar itu, serta kewajiban dan tanggungjawab masing-masing anggota masyarakat.

SIAPA PENDAMPING MASYARAKAT

Pendamping pengembangan masyarakat adalah orang yang terkategorikan sebagai pengantar perubahan (agent of change), baik yang berada di dalam sistem sosial masyarakat (insider change agents) maupun yang berada di luar sistem sosial masyarakat bersangkutan (outsider change agents). Kedua jenis pengantar perubahan ini terdiri atas individu-individu tergolong formal, para penyuluh dari berbagai instansi pemerintah, penyuluh non-formal, anggota dari LSM tertentu dan sukarelawan, termasuk para Penyuluh (Terampil dan Ahli) dari berbagai Dinas Pemerintah, Penyuluh Swakarsa, dan lainnya. Dewasa ini dan untuk kurun waktu selanjutnya, Pendamping pengembangan masyarakat diharapkan terdiri dari individu-individu yang handal, profesional, *credible dan accountable,* yang memiliki kompetensi berkualitas, serta memiliki kemampuan berperan lebih dari sekedar melakukan perubahan perilaku masyarakat. Kelebihan peran itu diperlukan, agar secara bertahap pendamping dapat turut berkiprah meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan kedewasaan masyarakat di semua lapisan, sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat yang bermodal sosial tinggi, sejahtera, mandiri, berdaya, damai dan berkeadilan.

Studi kasus berkaitan dengan kompetensi Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli di berbagai daerah menunjukkan antara lain, bahwa ada kecenderungan para Pendamping petani ini memiliki kinerja yang dinilai petani masih relatif rendah (Suhanda 2008). Terdapat kesenjangan antara 'apa yang diharapkan petani' dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh kinerja Pendamping. Harapan petani yang amat jelas dan umum sifatnya adalah, bahwa bagi petani para Pendamping hendaklah memiliki kompetensi tinggi dalam aspek teknis budi-daya tanaman termasuk di sini pemuliaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian, dan aspek kewira-usahaan berkaitan dengan 'bisnis usaha-tani' yang menguntungkan dan berkeadilan bagi petani, termasuk di sini: mengatasi peran tengkulak dan pedagang pengumpul yang cenderung merugikan penghasilan petani (Syafiuddin 2007; Tamba 2007; Subagio 2008).

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun turut mengampu beberapa mata kuliah di IPB yang terkait dengan 'modal manusia', 'modal sosial' dan pengembangan SDM, serta turut membimbing para calon lulusan Program Master dan Program Doktor dalam melakukan penelitian tesis dan disertasi, dirasakan bahwa umumnya para calon lulusan belum sepenuhnya menyadari, bahwa setelah menyandang gelar baru itu diharapkan mampu/kompeten, dan bercita-cita menjadi Penyuluh Ahli/Pendamping atau Penyuluh pengembangan masyarakat yang handal dan profesional. Umumnya orang tersebut bercita-cita dengan gelar yang baru itu pada gilirannya mendapatkan posisi, kedudukan baru dan memperoleh kenaikan pangkat/jabatan di institusi masing-masing. Obsesi itu manusiawi sekali dan sah-sah saja karena betapa tidak mudah dan tidak nyamannya menjadi pendamping dalam pengembangan masyarakat.

Pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan berkualitas adalah orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tinggi di dalam memposisikan masyarakat selaku subyek yang unik, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mudah terungkap maupun tidak mudah terungkap. Di samping itu, pendamping pengembangan masyarakat 'wajib' memiliki kompetensi tinggi di dalam aspek teknis budidaya usaha *on-farm* dan *off-farm,* serta kompetensi kewirausahaan

terkait dengan aspek pasar komoditi pertanian dan bukan pertanian yang menjadi usaha masyarakat bersangkutan. Dari perspektif psikologik, pendamping pengembangan masyarakat dituntut mampu belajar mengembangkan dan memiliki daya empati dan kepedulian tinggi terhadap sesama, khususnya yang berkehidupan dan bernasib kurang menguntungkan dalam masyarakat. Pendamping diharapkan dituntut memiliki pancaindera, bahkan indera keenam yang tajam untuk menangkap berbagai aroma ketidakadilan, kebodohan dan pembodohan, keluguan, ketidaksadaran dan mudahnya masyarakat didustai oleh oknum-oknum yang memiliki *interest* pribadi yang cenderung mendeprivasi dan merampas hak-hak masyarakat.

Dari demikian banyak tuntutan yang ditujukan kepada pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan profesional, sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan era informasi yang penuh tantangan dan kompetisi, maka secara ideal individu-individu yang berposisi dan bertekad berkiprah selaku Pendamping pengembangan masyarakat perlu memahami dan mendalami kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki, agar mampu berperan selaku mitra/teman 'sejawat' masyarakat, pengantar perubahan, pemberdaya, pemerhati dan reformis di dalam sistem sosial masyarakat. Kondisi ideal tersebut dapat dicapai oleh para pendamping, jika selalu terdorong untuk belajar dan belajar berbagai *subject matters* yang akan berdampak positif memperkaya modal sosial dan kualitas SDM serta kepribadiannya.

Individu-individu yang terkategori sebagai pendamping pengembangan masyarakat secara umum dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni (1) Yang saat ini telah dan sedang berposisi sebagai penyuluh di berbagai instansi pemerintah, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon PNS, kader pembangunan desa, kader Posyandu, sukarelawan dan kader pengembangan masyarakat, kader-kader pembangunan bidang-bidang spesifik, sukarelawan dan lainnya. Perkembangan terakhir pengertian Pendamping ditemukan juga di dalam Program 'Tanggungjawab Sosial Perusahaan' (CSR = Corporate Social Responsibility), di mana tokoh masyarakat (insider change agents) terlibat dalam pengembangan masyarakat bekerjasama dengan dan disponsori oleh pihak perusahaan (Sumaryo 2009); (2) Mereka yang saat ini sedang dalam proses belajar formal di berbagai institusi pendidikan yang berkiprah menyiapkan lulusan-lulusan calon pendamping pengembangan masyarakat. Termasuk pada golongan manapun, maka pendamping pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan kapasitas modal sosial dan kualitas SMD guna menjawab tantangan perubahan yang demikian pesat dewasa ini.

KAPASITAS MODAL SOSIAL PENDAMPING

Seorang calon penumpang kapal pesiar mewah bertanya kepada nakhoda kapal: 'Berapa kapasitas optimal kapal ini?' Nakhoda menjawab: '2000 orang penumpang'. Kapasitas kapal yang dimaksudkan adalah kemampuan optimal kapal untuk mengangkut penumpang secara aman dan nyaman. Sementara kapasitas pendamping dalam hal modal sosial tiada lain adalah kemampuan pendamping (yang optimal) dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman di dalam proses pengembangan dirinya. Jika kapasitas kapal pesiar di atas amat ditentukan oleh tonase, kehandalan

mesin, dan bahan-bahan pembuat kapal dan kapasitas bahan bakar, maka kapasitas pendamping amat berkaitan dengan modal manusia (SDM) dan pengalaman belajar yang dimiliki. Dengan kata-kata lain, seorang pendamping memiliki kapasitas modal sosial tinggi, jika ia memiliki kualitas SDM dan kepribadian tinggi, serta kemampuan melakukan interaksi sosial yang berkualitas dan *elegan*, antara lain sebagai dampak positif dari proses belajar yang pernah dijalani selama hidupnya.

Modal sosial berkualitas (qualified social capital) menurut Dasgupta dan Serageldin (2000) adalah serangkaian perilaku orang, kelompok orang atau masyarakat, yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya keterpercayaan sosial, *social trust* yang tinggi (tidak ada dusta di antara kita), kejujuran, kehangatan di dalam berinteraksi sosial, kepedulian kepada nasib sesama (yang menderita) dan penghargaan yang tinggi terhadap waktu, yang dapat dijadikan aset produktif, serta penghargaan tinggi pada harga diri/martabat manusia. Ciri lain dari modal sosial tinggi adalah 'demokratisasi' dan berkembangnya rasa keadilan dan pengakuan tinggi atas hak-hak individu. Modal sosial berkualitas dan tinggi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat madani (civil society) adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat di luar campur-tangan pemerintahan formal, yang memiliki kemampuan melakukan tata-laksana pemerintahan (self governance) yang didasasi oleh *social trust* dan nuansa demokratisasi yang tinggi (Fukuyama 1999).

Pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan profesional perlu memiliki kapasitas modal sosial yang optimal, yang memungkinkannya berkiprah, berperan dan berfungsi selaku mitra, teman dan sejawat dari tokoh-tokoh masyarakat (insider change agents), sehingga dengan begitu masyarakat memiliki kepercayaan tinggi di dalam proses perubahan positif sesuai harapannya untuk perlu dikembangkan strategi proses belajar yang terencana dengan baik, agar Pendamping berpeluang belajar secara bebas dan optimal, tanpa tekanan untuk meningkatkan kapasitas modal sosialnya.

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN MODAL SOSIAL

Landasan utama dalam upaya ini adalah menajamkan (shaping) cara-cara pendamping di dalam proses berkomunikasi secara internal dan eksternal. Pada dasarnya setiap orang butuh berkomunikasi, bahkan sejak usia sangat dini kebutuhan itu telah dapat diamati. Seorang bayi sehat yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sehat, pasti menangis saat keluar dari rahim ibunya. Bayi itu menangis karena apa? Ini gejala bahwa bayi itu membutuhkan berkomunikasi karena belum dapat berbicara untuk menyatakan kebutuhan diakui sebagai manusia dan berhenti menangis tatkala bidan atau siapa saja yang membantu persalinan itu memberi respon positif, yakni menyelimutinya dengan kain hangat dan menyentuhnya dengan rasa sayang. Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak mungkin dapat hidup tanpa beinteraksi dengan orang-orang lain dan dengan banyak hal. Dengan bekal akal-budi yang diterima dari Tuhan, setiap orang dapat berkomunikasi dengan dirinya tentang apa yang dirasakan, pikirkan dan apa yang dibutuhkan. Misalnya, seseorang dapat memukul-mukul kepalanya sendiri ketika merasa kecewa dan menyesal mengapa telah berbuat sesuatu yang bodoh, sehingga telah mengecewakan teman hidupnya. Sebaliknya, seorang dosen muda dan relatif lama membujang dapat tersenyum atau tertawa sendiri ketika menyadari dan merasa

bahagia, bahwa ada teman sekampus lawan jenis yang telah mau menerima cintanya. Di sini tampak dengan jelas, bahwa melalui komunikasi seseorang dapat mengecewakan atau membahagiakan dirinya dan orang-orang lain. Bahkan proses itu bisa berkelanjutan di dalam komunikasi internal karena ada rasa kecewa atau sebaliknya rasa bahagia, seseorang bisa sulit tidur, hatinya selalu gelisah dan sebagainya. Transfer informasi adalah merupakan inti penting di dalam setiap kejadian komunikasi.

Pemahaman tentang komunikasi demikian penting di dalam upaya untuk meningkatkan modal sosial. Orang-orang lain akan mempercayai Anda, jika pada setiap berkomunikasi, Anda selalu mencoba berkata benar, berkata konsisten, menggunakan kata-kata sederhana dan senantiasa berupaya membahagiakannya dengan berbuat yang terbaik baginya. Dengan begitu, merasa diakui dan dihargai posisi, status dan keberadaannya; merasa dimanusiakan dan dihargai martabatnya. Agar modal sosial dapat ditumbuh-kembangkan dengan baik, maka pendamping perlu terus-menerus belajar untuk melakukan hal-hal berikut dalam kiprahnya turut mengembangkan masyarakat, agar yang disebut terakhir ini menaruh kepercayaan besar padanya, yakni:

1. Melakukan upaya untuk mengendalikan, mengontrol egonya secara ketat dan penuh perasaan.
2. Menjadikan dirinya sebagai pelayan sesama, bukan sebaliknya agar orang-orang lain melayani dirinya.
3. Melatih diri untuk selalu berbuat yang terbaik bagi sesama, khususnya yang memerlukan bantuan dan pertolongan.
4. Membiasakan diri untuk mampu mendengar dengan baik dan sabar kata-kata dari mulut orang-orang lain, termasuk kata-kata yang mungkin menyinggung atau menyakiti dirinya.
5. Di dalam bertutur kata dan berkomunikasi dengan siapa saja mampu melakukannya secara dewasa, tidak emosional dan tidak terprovokasi oleh emosi orang-orang lain.
6. Memampukan diri untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran berdasarkan hati nurani dan kebenaran hukum yang berlaku universal.
7. Memampukan diri untuk menghargai dan menghormati pikiran dan perasaan orang-orang lain, serta mampu menjauhkan diri dari kecenderungan mengkritisi secara tajam kelemahan dan kekurangan orang-orang lain, khususnya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip hidup dirinya.
8. Memampukan diri untuk pandai memuji dan mengapresiasi perilaku orang-orang lain, bahkan juga kelemahan dan kekurangannya, sehingga merasa dibahagiakan dan dimanusiakan.
9. Memampukan diri untuk selalu konsisten di dalam berbagai komunikasi dan interaksi dengan orang-orang lain, termasuk konsisten di dalam membuat kesepakatan (komitmen) dan perjanjian.
10. Mengembangkan keberanian untuk selalu berperilaku jujur, meminta maaf jika berbuat kekhilafan dan kesalahan, serta *ikhlas dan legowo* memberi maaf jika ada orang-orang lain minta saat mereka melakukan hal-hal negatif.
11. Memampukan diri untuk secara konsisten lentur (flexible) di dalam menyesuaikan diri dengan sistem nilai (value system) yang dianut oleh orang-orang lain.

12. Memampukan diri untuk menggunakan panca indera sepeka dan setajam mungkin ketika berinteraksi dengan orang-orang lain.
13. Melalui penajaman panca indera itu senantiasa peka terhadap kebutuhan-kebutuhan nyata dan yang dirasakan (real and felt needs) orang-orang lain.
14. Mengembangkan kemampuan untuk menganalisis berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik potensi SDA, SDM dan lainnya.
15. Mengembangkan kemampuan untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pemenuhan berbagai kebutuhan.
16. Mengembangkan kemampuan untuk selalu memposisikan diri tidak sebagai guru yang menggurui orang-orang lain, sebaliknya sebagai 'pelajar' yang selalu ingin belajar dan mempelajari (ciri-ciri dan kebutuhan-kebutuhan) orang-orang lain.
17. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi berkualitas dengan siapa saja, menggunakan kata-kata dan bahasa sederhana, mudah diterima dan senantiasa cenderung terdorong untuk menyenangkan dan membahagiakan orang-orang lain melalui apa yang diucapkannya.
18. Mengembangkan kemampuan menghargai dan mengelola waktu secara efisien dan produktif, serta mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Modal sosial yang dimiliki oleh pendamping secara bertahap perlu dibina dan dikembangkan, baik melalui pembelajaran sendiri (otodidak) maupun melalui proses belajar di dalam institusi diklat dan pada saat-saat pendamping berinteraksi-sosial dalam masyarakat sebagai bagian dari praktikum lapangan. Dalam kaitan ini maka tenaga-tenaga dan pakar akademik dari kampus dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu perilaku dan ekonomi, serta yang berposisi selaku Widya Iswara di berbagai institusi diklat bidang-bidang pembangunan spesifik perlu dimobilisir, diposisikan dan lebih diperankan sebagai nara sumber dan sumber belajar bagi para pendamping.

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

SDM pendamping berkualitas dan handal dicirikan antara lain oleh kinerja dan kompetensinya yang tinggi, khususnya kompetensi teknis, kompetensi berinteraksi sosial dan kompetensi kewirausahaan (entrepreneurship), serta memiliki daya fisikal. Sebelum dan selama berkiprah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat, maka daya-daya tertentu yang dimiliki pendamping perlu lebih ditajamkan dan ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga memiliki penampilan sederhana, *low profile,* berjiwa kritis, arif, terbuka, berkeperibadian tinggi, ramah, sangat mudah menghargai dan menghormati orang-orang lain, memiliki daya penguasaan dan pengendalian diri yang kuat, tidak sombong apalagi merendahkan orang lain, kooperatif, mudah bekerjasama dengan siapa saja peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang-orang lain, memiliki prinsip hidup mengutamakan kebenaran akal-budi/hati nurani, mampu berpikir dan berbuat secara rasional dan obyektif, menjauhkan diri dari hal-hal yang berciri emosional, berprinsip pada *'money is something, but it is not everything',* hidup ini indah dan perlu disyukuri, mampu berorientasi ke bawah, mampu memberi contoh hidup

hemat dan *ambeg parama arta, tidak besar pasak dari tiang,* mampu memposisikan setiap orang sebagai individu-individu unik (tidak main pukul rata), mampu menerapkan prinsip hidup: *daya manusia adalah sesuatu yang tidak statik, melainkan lentur dan dapat berubah antara lain melalui proses belajar* (Lincoln 1985: 'Perbuatan/tindakan manusia dapat dimodifikasi sampai batas tertentu, tetapi ciri-ciri alamiah/kodrati manusia tidak dapat diubah'*, 'Human action can be modified to some extent, but human nature cannot be change'*), mampu memegang dan menerapkan falsafah *nasib seseorang dapat berubah, apalagi yang bersangkutan yang terdorong mengubahnya.*

Bagaimana tingkat kualitas SDM dapat diukur? Secara umum, ada tiga sumber daya dapat dijadikan bahan untuk evaluasi tentang kadar atau tingkat dari kualitas SDM seseorang, yakni:

1. Daya fisikal: Daya ini berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, yaitu daya tahan fisik, *stamina,* tidak mudah lelah secara fisik, tidak mudah mengantuk, memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai penyakit, memiliki daya pikir encer (cepat dan mudah mengambil keputusan bijak), murah dan mudah senyum dalam berinteraksi dengan orang-orang lain, tahan terhadap stress, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketahanan fisik, seperti kondisi panca indera yang normal dan sehat (belum pikun).
2. Daya psikologik: Daya yang berkaitan dengan ketahanan mental, kejiwaan dan perasaan; kemampuan seseorang di dalam menata, mengontrol atau mengendalikan *ego-nya,* khususnya saat berinteraksi dengan orang-orang lain; kemampuannya di dalam menata dan mengendalikan emosinya, serta kemampuannya untuk senantiasa mampu berpikir positif terhadap orang-orang lain.
3. Daya sosiologikal: Berkaitan dengan kemampuan seseorang di dalam melakukan berbagai interaksi sosial secara bijak dan elegan, tidak mau menang sendiri; kemampuan mendengar dan merespon pendapat/pikiran orang-orang lain secara sungguh-sungguh dan berpikir positif mengenai hal itu; kemampuan berkomunikasi menggunakan kata-kata sederhana, bernas, jelas dan tajam, tidak emosional; kemampuan 'membaca' arah pembicaraan orang-orang lain terkait dengan kebutuhan dan kemungkinan adanya maksud terselubung *(hidden agenda),* dan hal-hal lain berhubungan dengan perilaku berinteraksi sosial dan berkomunikasi.

Seseorang yang bertekad kuat untuk senantiasa meningkatkan kualitas SDM-nya dicirikan oleh semangat dan dorongan yang tinggi guna terus-menerus belajar dan belajar, berinteraksi dengan berbagai media serta berinteraksi dengan banyak orang. Hal tersebut dilakukan tidak untuk dirinya semata-mata, tetapi juga demi kemajuan dan perkembangan institusi dan masyarakatnya (Gilley and Eggland 1989). Ia memiliki prinsip belajar seperti yang dikatakan oleh Adler (1985): 'Tujuan dari belajar adalah pertumbuhan, tidak seperti badan kita maka pikiran dapat terus tumbuh sepanjang hayat dikandung badan' (The purpose of learning is growth, and our minds, unlike our bodies can continue growing as we continue to live). Dari hari-ke-hari ia ingin belajar memperbaiki dan meningkatkan SDM dirinya, sehingga 'saya hari ini identik dengan saya kemarin + proses belajar' :
'Me = I + learning experiences' (Popenoe, 1989).

TAKTIK MENINGKATKAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SDM

Upaya meningkatkan kapasitas modal sosial dan kualitas SDM pendamping perlu dilakukan melalui taktik atau siasat 'bergerilya' secara terkoordinasi, artinya gerakan proses pembelajaran bagi Pendamping hendaklah dilakukan berdasarkan kepada fakta-fakta yang perlu ditemukan secara 'gerilya'. Gerilya ini dilakukan di instansi-instansi pemerintah yang mengemban peran selaku pengembangan masyarakat, khususnya yang terkait dengan dampak dari Undang-Undang Penyuluhan No. 16 Tahun 2006. Dalam tahap ini perlu dilakukan inventarisasi dan kajian tentang:

1. Keberadaan dan Program dari Diklat Penyuluhan.
2. Keberadaan dan Program dari jajaran Widya Iswara Dinas-dinas terkait.
3. Keberadaan dan status dari Pendamping pengembangan masyarakat, serta program-programnya.
4. Sarana dan dana yang tersedia bagi Program pengembangan masyarakat. Sedapat mungkin diupayakan, agar dana untuk pengembangan masyarakat dewasa ini dan di masa mendatang tidak perlu 'diproyekkan', melainkan digunakan dana-dana yang secara konvensional tersedia dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Keberadaan dukungan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten bersangkutan.

Tahap berikutnya adalah Perencanaan umum untuk melakukan kegiatan diklat bagi semua pendamping pengembangan masyarakat di tingkat kabupaten. Di sini keterlibatan jajaran Widya Iswara, institusi terkait dan pakar perguruan tinggi mutlak diperlukan, khususnya yang akan berfungsi mengukur kesenjangan kompetensi pendamping, antara yang dimiliki sekarang dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, serta merancang materi-materi pembelajaran (subject matters) guna meningkatkan kompetensi para Pendamping pengembangan masyarakat. Dari proses ini dihasilkan rumusan tentang kompetensi-kompetensi baru yang perlu dibelajarkan kepada pendamping/peserta diklat. Pada tahap ini diidentifikasi dan dipilah-pilah materi-materi pembelajaran yang diperlukan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi teknis
2. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan
3. Meningkatan keterampilan pendekatan, interaksi sosial dan komunikasi dengan masyarakat.

Tahap selanjutnya, secara lebih rinci kegiatan diklat dijabarkan ke dalam pengembangan kurikulum, berupa GBPP (Garis-garis Besar Proses Pembelajaran), TIU (Tujuan Instruksional Umum) dan TIK (Tujuan Instruksional Khusus), serta Kerangka Acuan dari program diklat yang akan diselenggarakan. Semua kegiatan ini dilandaskan kepada materi-materi pembelajaran sesuai dengan upaya peningkatan kompetensi spesifik.

Efisiensi dan keefektivan proses belajar hendaklah dijadikan pedoman di dalam upaya besar untuk meningkatkan kapasitas modal sosial dan kualitas SDM pendamping. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait, yakni dinas-dinas terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten, unsur pakar perguruan tinggi, LSM dan sukarelawan terkait dan lembaga penyandang dana (donor) jika ada, perlu sepakat dan mendukung gagasan pengembangan masyarakat lebih berciri *bottom-up program planning*.

KENDALA DAN TANTANGAN

Di atas kertas wacana tentang upaya peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas SDM pendamping pengembangan masyarakat tampaknya mudah dan sederhana. Jika upaya itu berhasil, maka keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat tercipta secara bertahap. Namun dalam kenyataan di lapangan akan lain ceritanya, karena diduga beberapa hal akan dihadapi sebagai kendala dan sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dan ditanggulangi. Hal-hal yang dimaksudkan adalah:

1. Tidak mudahnya orang untuk diajak berubah, bahkan banyak kasus ditemukan di manamasyarakat telah merasa puas dengan berbagai kekurangan dan masalahnya (pasrah pada nasib).
2. Sistem dan program perkembangan masyarakat sudah terlanjur bernuansa *top-down* dan berciri keproyekkan, sehingga keberlanjutannya (sustainability) rendah dalam masyarakat.
3. Dukungan kelembagaan penyuluhan, baik di pusat maupun di daerah relatif lemah (temuan penelitian disertasi: Bustang 2008, Tomatala 2008, Suhanda 2008, Subagio 2008, Marius 2007 dan Tamba 2007).
4. Pembangunan SDM belum diposisikan sebagai program dengan prioritas tinggi seperti halnya pembangunan sarana fisik.
5. Program pengembangan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat masih belum menjadi prioritas, komitmen/kontrak politik dan perhatian sungguh-sungguh bagi kalangan aktivis Partai Politik dan para anggota DPR dan DPRD yang terhormat, kecuali dalam kaitan pemenangan pemilu.
6. Kesadaran yang masih rendah pada kalangan pengabdi dan pelayan publik, bahwa berbuat sesuatu atau melakukan pelayanan terbaik bagi publik dan masyarakat adalah ibadah yang amat berpahala.
7. Tidak semua kalangan dalam institusi pemerintah dan publik dapat menerima prinsip *debirokratisasi dan reformasi*, sesuatu yang mudah dilakukan mengapa mesti tetap dipermudah jika terbuka peluang untuk dipersulit?
8. Upaya meningkatkan kualitas kepribadian, mengendalikan egoisme dan melakukan pe-layanan jasa yang elegan kepada publik masih belum merupakan bagian dari kurikulum di banyak institusi pendidikan tinggi dan menengah.
9. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak dasarnya, maka hal itu mengganggu dan merugikan yang cenderung mempertahankan *status quo,* sehingga tidak bisa dihindari timbulnya konflik sosial karena adanya pertentangan dan perbedaan kepentingan, serta *vested interest.*

Masih banyak lagi kendala yang mungkin ditemukan di dalam menerapkan gagasan mulia tersebut. Namun semua kendala itu akan dapat ditanggulangi secara bertahap, jika semua unsur yang terlibat dan terpanggil untuk meningkatkan kesejahteraan, keberdayaan dan berkembangnya masyarakat ke arah positif secara ikhlas dan ridho mampu mendengarkan suara hati, hati nurani atau *basiroh* masing-masing, bahwa melakukan ibadah seperti itu amat berpahala dan Tuhan sangat berkenan.

PEMECAHAN MASALAH

Dalam era globalisasi dan kompetisi yang begitu keras gaung dan pengaruhnya dewasa ini, maka sesuatu gagasan baik yang cenderung ingin mengangkat derajat dan martabat kaum mayoritas yang masih jauh dari hidup sejahtera selalu saja dihadapkan kepada kalangan mapan yang *well established* dan menguasai sebagian besar akses dan aset negara. Tetapi bagaimanapun, dan dikaji dari berbagai perspektif apapun, memperjuangkan dan melakukan *advocacy* terhadap kebenaran akan hak-hak dasar masyarakat mayoritas yang masih memprihatinkan nasibnya adalah sah, benar adanya dan *taken for granted.* Mestinya semua orang menganggap wacana itu penting dan perlu dijadikan kenyataan, apalagi kalau disadari bahwa negara ini telah berusia 64 tahun, artinya dalam usia dewasa, bahkan tergolong manula, penyelenggara negara dan yang tergolong mapan perlu lebih arif dan positif di dalam menyikapi hidup ini, yakni memberikan dukungan dan komitmen untuk turut secara aktif mengangkat derajat dan martabat kaum yang masih dihimpit oleh berbagai beban hidup dan belum sejahtera untuk bangkit dan dikembangkan ke arah berkehidupan yang lebih layak dan manusiawi.

Jadi jika secara moral, politik dan kebijaksanaan semua komponen bangsa secara ikhlas dan ridho mendukung realisasi dari pengembangan masyarakat ke arah berkehidupan yang lebih positif itu, maka sembilan kendala yang disebutkan di muka secara bertahap dapat ditanggulangi. Di sisi lain, kendala dan tantangan itu mungkin saja dapat ditanggulangi jika semua unsur pemerhati, peminat dan pelaksana pengembangan masyarakat, baik itu jajaran pendamping, calon Pendamping, Widya Iswara, LSM maupun unsur-unsur Perguruan Tinggi tergerak dan terpanggil serta mampu untuk bersehati, saling bergandengan tangan dan merapatkan barisan merancang dan melakukan tugas-tugas mulia mengembangkan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengembangan masyarakat dapat dilakukan oleh pendamping yang handal dan professional, namun tidak mudah memperoleh para pendamping pengembangan masyarakat yang ideal, kompeten dan memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan masyarakat. Kendala dan tantangan, baik berciri internal dan ekternal dari sosok pendamping berdiri tegak menghadang niat-niat baik dari pengantar perubahan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Adler M. 1985. In: Salkind N. *Theories of Human Development.* New York: John Wiley and Sons.

Bustang. 2008. 'Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan keluarga Miskin'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Dasgupta P, Serageldin I. 2000. *Social Capital A FaMultifaceted Perspective.* Washington DC: The World Bank.

Donnelly J. 1989. *Universal Human Rights in Theory and Practice.* Cornell Univ. New York:Ithaca Press.

Fukuyama F. 1999. *The Great Disruption Human Nature and The reconstitution of Sosial Order.* New York: Simon and Schuster.

Gilley JW, Eggland SA. 1989. *Principles of Human Resource Development.* AddiSon-Westley Publ. Co. Inc. in Assoc. with Univ. Associate Inc. Reading. Massachusetts Menlo Park California New York Don Mills Ontario.

Ife J. 1995. *Community Development Creating Community Alternatives Vision, Analysis And Practice.* Melbourne: Longman.

Lincoln A. 1985. In: Salkind, N. *Theories of Human Development.* New York: John Wiley and Sons.

Marius JA. 2007. 'Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian di Nusa Tenggara Timur'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.

Misra RP. 1981. *The Changing Perception of Development Problems.* In: (Eds.) Misra, R.P.and M.Honjo, 'Changing Perception of Development Problems'

Popenoe D. 1989. *Sociology.* New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Subagio H. 2008. 'Kapasitas Petani Dalam Mewujudkan Keberhasilan Usahatani Sayuran dan Padi di Malang dan Pasuruan'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.

Sen A. 1982. *Poverty and Famine An Essay on Entitlement and Deprivation.* Oxford: Clarendon Press.

Sugiharto ST. 2007. 'Fenomena Anak Jalanan dan Pengentasannya di Bandung, Bogor dan Jakarta'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Suhanda NS. 2008. 'Hubungan Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Pertanian di Jawa Barat'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sumaryo. 2009. 'Implementasi Tanggungjawab Sosial (CSR) Perusahaan Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Prov. Lampung'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Syafiuddin. 2007. 'Hubungan Karakteristik Individu dengan Kompetensi Wirausaha Petani Rumput Laut di Sulawesi Selatan'. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.

Tamba M. 2007. 'Kebutuhan Informasi Pertanian dan Aksesnya Bagi Petani Sayuran di Jawa Barat'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Tomatala GSJ. 2008. 'Kompetensi dan Keberdayaan Peternak Dalam Pengembangan Usaha Sapi Potong di Provinsi Maluku'. Disertasi pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SDM PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

I Gde Suyatna[4]

ABSTRACT

The development problems are getting complicated along with the progress of globalization era and human needs. Due to the condition, it is required an integrated approach, including the integration of financial and cultural sosial capitals. The cultural sosial capital is very potential for Indonesian, since Indonesian has a lot of local wisdoms. The problem is how to apply the potency of local wisdoms in their daily life. Subak (traditional Balinese irrigation system), Banjar (traditional Balinese organization) and traditional values of Tri Hita Karana have important role in development, especially in Bali. Bali is famous for its "banjar family planning systems", "subak systems", and tourism with the Tri Hita Karana concept. It is believed that in other areas outside of Bali have also similar local wisdoms. The further problem is how this cultural sosial capital can be regularly applied in their daily life. It is required a development communication in which it will remain the local wisdoms to empower society in facing complex challenging globalization era. The highly awareness of local wisdom will result in increasing competitiveness of a country and at the end it can bring into the winner of competition.

Key words: *Complicated, integrated, financial and cultural social capital, sustainable*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hiruk pikuk pembangunan yang melibatkan masyarakat di Indonesia berlangsung secara berkesinambungan, dimulai dari pembangunan politik, dengan digelarnya pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan dinamikanya, dilanjutkan dengan pemilihan presiden. Sementara pembangunan politik berlanjut yang meninggalkan berbagai permasalahan kemudian muncul permasalahan perbatasan, permasalahan dalam negeri yang mengancam integrasi bangsa, permasalahan kesehatan dengan munculnya berbagai penyakit, permasalahan ekonomi yang masih menghimpit masyarakat, permasalahan ekonomi dan persaingan global, permasalahan keamanan, dan terakhir permasalahan hukum yang diduga akibat persaingan antara lembaga-lembaga penegak hukum yang mengakibatkan pemberantasan korupsi terlupakan, dan lain-lain permasalahan, termasuk permasalahan berkembangnya kebutuhan manusia. Permasalahan demi permasalahan muncul sehingga permasalahan pembangunan semakin "*complicated*", yang semakin menjauhkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perlunya Pendekatan Pembangunan yang "*integrated*".

Masyarakat Indonesia yang semakin tenggelam dalam lingkaran setan permasalahan tampaknya memerlukan penanganan secara "*integrated*". Diperlukan pendekatan pembangunan secara terintegrasi, yang mampu mengintegrasikan antara berbagai lembaga, termasuk mengintegrasikan "*financial capital*" dengan "*cultural social capital*". Integrasi antara *financial capital* dengan *cultural social capital* sangat diperlukan karena banyak contoh kegagalan dalam pembangunan yang hanya mengandalkan *financial capital*, seperti banyaknya terjadi kebocoran-

[4] Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar

kebocoran anggaran dalam pembangunan sehingga munculnya pembangunan biaya tinggi. Banyak terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak fokus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesemuanya akibat dari kurang jelinya memanfaatkan kearifan lokal yang hakikatnya mampu mengawal pembangunan tersebut. Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan kearifan lokal yang sangat potensial untuk dikembangkan. Masalahnya adalah, bagaimana memanfaatkan potensi kearifan lokal tersebut sehingga teraktualisasikan dalam kehidupan keseharian.

Tujuan

Tulisan ini ditujukan untuk menggali potensi kearifan lokal serta membuktikan peranannya dalam membantu masyarakat keluar dari lingkaran setan permasalahan yang nampaknya semakin menjauhkannya dari cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Manfaat

Dengan semakin tergalinya potensi kearifan lokal maka dapat dikembangkan berbagai modal alternatip (cultural social capital) untuk diintegrasikan dengan *financial capital*, sehingga dapat membantu semakin cepatnya masyarakat dapat dikeluarkan dari lingkaran setan permasalahan, serta dapat membantu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

MATERI DAN METODE

Materi

Materi utama dari tulisan ini adalah suatu hasil penelitian yang berjudul "Ciri-Ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional di Bali dan Peranannya dalam Pembangunan" yang dikaitkan dengan beberapa tulisan yang menggambarkan tentang perlunya modal alternatif sebagai penyeimbang modal finansial dalam pembangunan yang semakin *complicated* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tulisan-tulisan tersebut antara lain beberapa tulisan yang dikembangkan pada Seminar Nasional di Jakarta, 14 Mei 2005 yang berusaha mencari format pembangunan berbasis nilai yang dilandasi oleh rasa keprihatinan atas penyelenggaraan pembangunan di Indonesia, yang selalu ada tendensi pemerioritasan kepada pembangunan fisik dan peningkatan taraf ekonomi tanpa didasari pembinaan dalam nilai-nilai sosial budaya. Tulisan tersebut antara lain yang menggambarkan tentang nilai-nilai sosial masyarakat Bali, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Selanjutnya tulisan yang terakhir adalah tulisan yang secara langsung menggambarkan tentang peran modal sosial budaya (cultural social capital) sebagai modal alternatip dalam pembangunan yang disampaikan di Denpasar pada tanggal delapan September 2008.

Metode

Hasil penelitian yang berusaha menggambarkan tentang dinamika kelompok sosial tradisional dan perannya dalam pembangunan, khususnya di Bali dipakai sebagai titik awal pemikiran dalam tulisan ini untuk menunjukkan peranan modal sosial sebagai modal alternatif dalam pembangunan. Penelitian tersebut yang telah

dilaksanakan pada tahun 1982 mampu menggambarkan tentang dinamika kelompok sosial religius, khususnya di Bali, walaupun dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai agama tampaknya sejalan dengan pembangunan yang bernuansa ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga disimpulkan bahwa hal-hal yang bersifat tradisional yang hakikatnya merupakan kearifan lokal yang berdimensi sosial religius perlu direvitalisasi karena dapat bersinergi dengan pembangunan yang walaupun didominasi dengan nuansa-nuansa ekonomi. Dengan kesimpulan tersebut pada akhirnya dapat dikembangkan pemikiran tentang pengembangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas modal sosial sehingga menghasilkan masyarakat, termasuk kualitas SDM pendamping masyarakat yang jelas jati dirinya di era globalisasi. Dikembangkan pemikiran strategi peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas SDM pendamping masyarakat secara berkesinambungan melalui komunikasi pembangunan yang berkesinambungan pula yang selalu mengingatkan tentang potensi dan peran kearifan lokal di seluruh nusantara sehingga jati diri bangsa akan terus terbina. Dengan jati diri bangsa yang jelas dan kuat berlandaskan kearifan lokal yang merupakan kekayaan masing-masing wilayah nusantara maka bangsa Indonesia akan mampu berdaulat di seluruh nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kelompok Sosial Tradisional

Subak yang merupakan salah satu kelompok sosial tradisional di Bali yang berperanan untuk mengatur pembagian air bagi petani-petani sehingga mendapatkan pembagian air yang adil di sawah yang digarapnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan dengan pengaturan-pengaturan berdasarkan kesepakatan bersama serta selalu berbasiskan nilai-nilai agama. Dengan demikian kegiatannya yang utama adalah kegiatan sosial berbasiskan nilai-nilai agama.

Dinamika subak yang walaupun dominan berbasiskan nilai-nilai agama tampaknya tak bertentangan dengan pembangunan yang bernuansa ekonomi dalam rangka membantu mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat, khususnya petani. Hal ini terbukti dari keterkaitan antara dinamika subak yang sosial religius dengan keberhasilan petani dalam menyelesaikan pelunasan kredit Bimas. Keberhasilan petani dalam mengatur subaknya sangat menentukan keberhasilan petani untuk menunaikan kewajibannya dalam melunasi kredit dengan faktor determinan 0,48, dan faktor determinan tersebut akan meningkat jika ditambahkan dengan faktor dalam dan luar lainnya (Gambar 1).

Banjar yang juga merupakan salah satu kelompok sosial tradisional di Bali yang berperan untuk mengatur warganya sehingga mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya, khususnya dalam kaitannya dengan keperluan adat dan agama. Tujuan utama banjar adalah untuk memberikan pelayanan bagi warganya dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan adat dan agama. Dengan demikian maka kegiatan banjar yang dipimpin oleh *kelian banjar* dominan dalam kaitannya dengan kegiatan sosial yang berbasiskan nilai-nilai agama.

Dinamika banjar yang walaupun dominan berbasiskan nilai-nilai agama juga tampaknya tak bertentangan dengan pembangunan yang bernuansa ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari keterkaitan dinamika banjar dengan keberhasilan KB, sehingga di Bali terkenal

dengan KB sistem banjar. Terbukti bahwa keberhasilan masyarakat dalam mengatur banjarnya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan KB, sebagai salah satu kegiatan pembangunan di banjar, yang dilihat dari persentase akseptor KB di banjar tersebut, dengan faktor determinan 0,68, dan faktor determinan ini meningkat (0,74) dengan memperhatikan faktor penyuluh KB (Gambar 2).

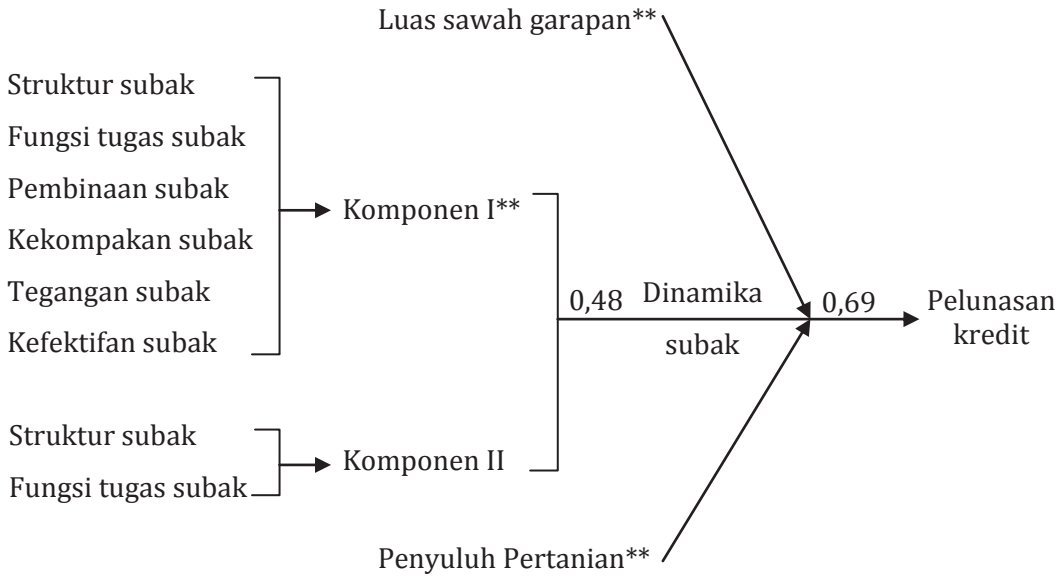

Gambar 1 Dinamika subak dalam pembangunan

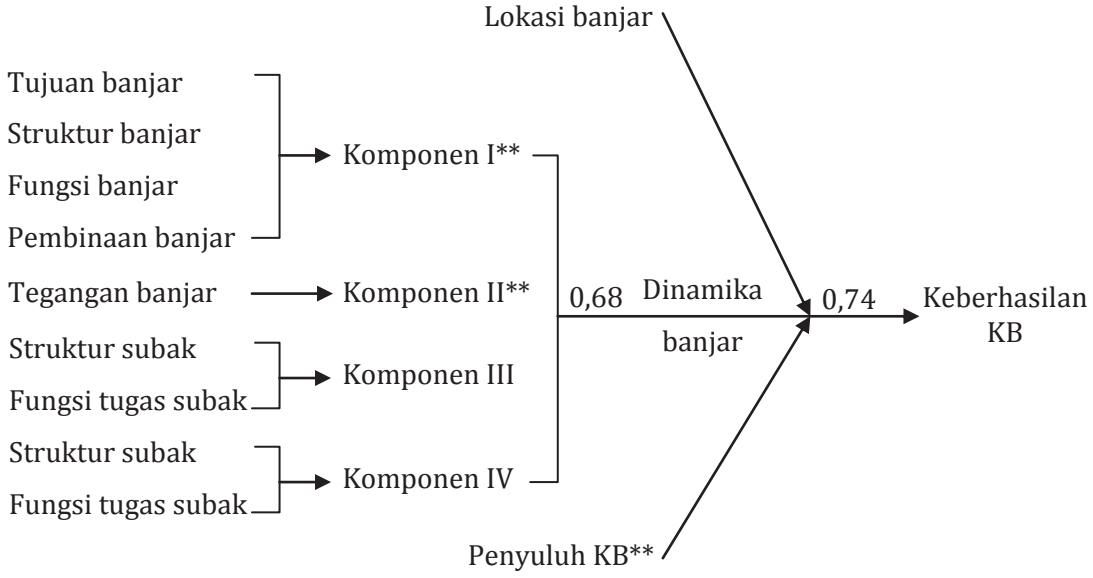

Gambar 2 Dinamika banjar dalam pembangunan

Membangun Sikap Hidup Berbasiskan Nilai-Nilai Sosial Budaya Membangun Sikap Hidup Berlandaskan Tri Hita Karana di Bali

Suyatna (2005) menunjukkan bahwa nilai Tri Hita Karana sebagai salah satu kearifan lokal di Bali dimanfaatkan antara lain dalam pembangunan pariwisata berbudaya sehingga mampu membangun pariwisata dengan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya yang merupakan kearifan lokal. Dinyatakan bahwa dengan nilai Tri Hita akan terbangun sikap hidup yang memuja Tuhan, menghormati sesama, serta menjaga lingkungan secara terpadu, karena ketiga sikap hidup itulah yang diyakini sebagai sumber kebahagiaan. Diperlukan pengamalan Tri Hita Karana secara terpadu, baik dalam kehidupan individu, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan kerja. Dipertegas lagi bahwa memuja Tuhan bukanlah untuk melupakan kehidupan duniawi. Memuja Tuhan justru untuk mendatangkan kekuatan suci untuk menata kehidupan di dunia agar kehidupan di dunia menjadi semakin berkualitas. Dunia yang semakin berkualitas merupakan indikator berhasilnya pengamalan Tri Hita Karana.

Usman Pelly (2005) menunjukkan sembilan nilai utama dalam kehidupan orang Batak, yang dapat diperas berdasarkan substansinya menjadi tiga nilai yang penting, yaitu: (1) *hagabeon*, yang berarti keturunan dan umur yang panjang, (2) *hasangapon*, yang berarti kemuliaan dan harga diri, dan (3) *hamoraon*, yang berarti kekayaan, yang dikembangkan menjadi motto *3-H* yang merupakan motto orang Sumatra Utara untuk menjadikan dirinya unggul. Dengan demikian, ditegaskan kembali bahwa orang Batak selalu merindukan mendapatkan anak yang unggul atau menjadi orang yang nomor satu. Banyak orang batak yang dihinggapi penyakit "to be number one syndrome."

Idrus Abustam (2005) menunjukkan peranan nilai *lima akkatenningeng* (lima pegangan) etnik Bugis, yaitu: (1) *adatongeng* (berbuat sesuai dengan ucapan), (2) *lempu* (lurus dan jujur, terutama yang berkaitan dengan harta dan uang), (3) *getteng* (teguh pada keyakinan yang benar), (4) *sipakatau* (saling menghargai sesama manusia), dan (5) *mappesona ri dwata se uwe* (berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa). Lima pegangan dan sejumlah nilai-nilai luhur masyarakat Bugis lainnya berfungsi menjadi kontrol atas berjalannya tatanan sosial yang harus diperankan oleh pemimpin dengan semua aparatnya serta seluruh masyarakat.

Lilik (2007) mengingatkan cerita lama tentang Jepang, yang hakikatnya menggambarkan tentang pentingnya peran sumber daya manusia. Cerita lama yang sering ditampilkan adalah kisah Kaisar Hirohito dan bom atom. Dikisahkan bahwa Kota Nagasaki dan Hiroshima luluh lantah diterjang bom atom, dan tentara Jepang yang sangat kuat dalam sekejap menyerah serta mengakibatkan Negeri Jepang hancur dan bangkrut. Ditengah keterpurukan negara dan ketidakberdayaan rakyat, kaisar Hirohito mengumpulkan para cerdik pandai yang tersisa, dan mempertanyakan jumlah guru yang masih hidup. Sebagai pemimpin, Kaisar Hirohito berpikiran jauh ke depan, yang ditengah-tengah keterpurukan negerinya justru tidak membicarakan modal, sumber daya alam, pabrik, atau modal (kapital) lainnya, tetapi justru mempertanyakan manusia, yang lebih khusus lagi manusia pendidik yang bergelar guru. Dengan guru yang tersisa, maka Jepang mendidik manusianya untuk kemudian hari menjadi manusia pemenang.

Hakikatnya pemimpin-pemimpin Indonesia memiliki pemikiran yang sama dengan Kaisar Hirohito, yang mengutamakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehinga mencerdaskan kehidupan bangsa menjadilah amanat konstitusi, amanat Undang-Unang Dasar Republik Indonesia, yang bunyinya antara lain:

..... *Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan* ***kesejahtraan umum,*** ***mencerdaskan kehidupan bangsa,*** *dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah* ***Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia*** *itu dalam suatu* ***Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*****.....**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga maka pentingnya masalah pendidikan juga merupakan amanat konstitusi, khususnya amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi:

..... *Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan..... Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuh-an penyelenggaraan pendidikan nasional.....*

Tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk menghalang-halangi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha untuk mengembangkan potensi manusia sebagai makhluk homo sapiens merupakan suatu keharusan. Setiap saat bangsa Indonesia harus dirangsang untuk berpikir dan mengembangkan hasil proses berpikirnya untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Hasil proses berpikir itu juga dirangsang untuk disampaikan secara terbuka, dan memang sepatutnya untuk disampaikan secara terbuka sesuai dengan haknya, karena hak untuk menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh konstitusi, khususnya UUD RI 1945, yang berbunyi:

..... *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.....*
.....Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan ***mengeluarkan pendapat***

Berkembangnya teknologi informasi serta iklim desentralistik membuka peluang terjadinya proses pembelajaran masyarakat yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan potensi homo safiensnya disesuaikan dengan potensi wilayahnya. Diperlukan strategi pengembangan potensi homo sapiens yang disesuaikan dengan kearifan lokal serta potensi wilayahnya masing-masing agar berkelanjutan dalam menghadapi ancaman globalisasi yang semakin intensif.

KESIMPULAN

Masalah pembangunan semakin "*complicated*" dengan berkembangnya jaman serta berkembangnya kebutuhan masyarakat, serta semakin "*complicated*" lagi dengan semakin intensifnya tantangan serta ancaman globalisasi yang mampu mengganggu kesadaran masyarakat akan nilai-nilai yang berkembang yang berpeluang kontra produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang "*integrated*", antarlembaga, antarkomponen bangsa, termasuk antara *financial capital* dan *cultural social capital*.

Cultural social capital sangat potensial dikembangkan untuk diintegrasikan dengan *financial capital* karena wilayah nusantara sangat kaya dengan kearifan lokal tersebut, baik dalam bentuk pranata-pranata sosial yang ada maupun dalam bentuk nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat di seluruh nusantara. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi kearifan lokal secara berkesinambungan melalui komunikasi pembangunan yang berkelanjutan dengan selalu mengingatkan akan kearifan lokal tersebut sehingga menghasilkan masyarakat dan bangsa yang memiliki jati diri yang jelas menghadapi ancaman globalisasi yang semakin tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

Idrus A. 2005. Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan Sebagai Kekuatan Pembangunan Bangsa, Jurnal Sosiologi Indonesia, No. 07/2005

Jujun SS. 2000. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jujun SS. 2001. *Ilmu dalam Perspektif*: *Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lilik AAM. 2007. *Human Capital Competencies*: *Sketsa-Sketsa Praktik Human Capital Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Elex Madia Komputindo.

Suyatna IG. 2005. Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Bali Sebagai Kekuatan Pembangunan Bangsa, Jurnal Sosiologi Indonesia, No. 07/2005

Suyatna IG. 1982. Ciri-Ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional Bali dan Peranannya dalam Pembangunan. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Suyatna IG. 2008. Peran Modal Sosial Budaya (Social and Cultural Capital) Sebagai Modal Alternatip dalam Pembangunan, makalah pada Bintek Bela Negara, 8 September 2008, di Denpasar.

Suyatna IG. 2009. Pengembangan Budaya Spiritual Sebagai Penyeimbang Derasnya Budaya Material Untuk Menyongsong Kehidupan Hari Esok yang Lebih Baik, makalah Bintek Pembauran Bangsa, Maret 2009 di seluruh Kabupaten di Bali.

Usman P. 2005. Nilai-Nilai Masyarakat Sumatera Utara Sebagai Kekuatan Pembangunan Bangsa, Jurnal Sosiologi Indonesia, No. 07/2005.

Rumusan Hasil Diskusi Makalah Kelompok B

Hasil diskusi makalah kelompok B yang memaparkan empat makalah oleh empat orang pembicara menghasilkan rumusan sebagai berikut:

- Forum pendampingan dalam proses pengembangan masyarakat perlu dirumuskan untuk memfasilitasi kegiatan:
  - Pengembangan yang sinergis dalam mencari solusi atas permasalahan pendampingan yang bersifat lintas sektoral;
  - Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan masyarakat;
  - Pengembangan akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya sumber daya produktif dan kemitraan dengan pihak ketiga;
  - Peningkatan kemampuan dan kapasitas pendamping dengan tukar menukar pengalaman dalam pendampingan.
- Sumber daya manusia pendamping yang berkualitas dan handal dicirikan antara lain oleh kinerja dan kompetensinya yang tinggi, khususnya kompetensi teknis, kompetensi berinteraksi sosial dan kompetensi kewirausahaan (entrepreneurship), serta memiliki daya fisikal yang handal.
- Menghadapi program pengembangan masyarakat, pendamping perlu lebih ditingkatkan kapasitasnya sehingga ia memiliki penampilan sederhana, *low profile,* berjiwa kritis, arif, terbuka, berkepribadian tinggi, ramah, sangat mudah menghargai dan menghormati orang-orang lain, memiliki daya penguasaan dan pengendalian diri yang kuat, tidak sombong apalagi merendahkan orang lain, kooperatif, mudah bekerjasama dengan siapa saja peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang-orang lain, memiliki prinsip hidup mengutamakan kebenaran akal-budi/hati nurani, mampu berpikir dan berbuat secara rasional dan obyektif, menjauhkan diri dari hal-hal yang berciri emosional, mampu berorientasi ke bawah, mampu memberi contoh hidup hemat dan *ambeg parama arta, tidak besar pasak dari tihang,* mampu memposisikan setiap orang sebagai individu-individu unik (tidak main pukul rata), mampu menerapkan prinsip hidup: *Daya manusia adalah sesuatu yang tidak statik, melainkan lentur dan dapat berubah antara lain melalui proses belajar,* dan mampu memegang dan menerapkan falsafah *nasib seseorang dapat berubah, apalagi yang bersangkutan yang terdorong mengubahnya.*